Edisi Revisi Tahun 2017

RENCANA STRATEGIS

PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BIDANG MESIN DAN TEKNIK INDUSTRI TAHUN 2015 - 2019

DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KATA PENGANTAR

Rasa syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Bidang Mesin dan Teknik Industri Tahun 2015 - 2019. Renstra ini merupakan rencana jangka menengah (lima tahun) menuju kepada Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), yaitu *"Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berdasarkan Gotong Royong*" yang **s**elaras dengan visi PPPPTK Pertanian *"Terselenggaranya layanan prima pendidikan dan pelatihan dalam membentuk Pendidikan dan Tenaga Pendidikan yang professional dan bermartabat serta berdaya saing global".*

Penyusunan Renstra ini merupakan amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta dijiwai agenda prioritas pembangunan nasional (Nawa Cita). Diantara sembilan agenda Nawa Cita, terdapat dua hal yang terkait dengan tugas dan fungsi Kemendikbud, yaitu pembangunan pendidikan (Nawa Cita 5 dan Nawa Cita 8) dan pembangunan tata kelola dan reformasi birokrasi (Nawa Cita 2).

Renstra ini akan ditinjau setiap tahun dan direvisi sesuai dengan kemajuan yang telah dicapai serta perkembangan yang terjadi, agar selalu mutakhir dan tetap menuju kepada pencapaian Visi yang telah ditetapkan.

Kami menyadari bahwa untuk mewujudkan visi, misi serta tujuan dan sasaran strategis PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri memerlukan proses, kerja keras, integritas, dan komitmen semua pihak untuk selalu bersinergi dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan. Semoga, Rencana Strategis 2015 – 2019 ini dapat dipahami dan menjadi pedoman bagi unit kerja serta seluruh unsur PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Rencana Strategis PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri ini.

Cimahi, November 2017

Kepala PPPPTK BMTI,

Drs. Marthen Katte Patiung, MM

NIP. 195904161986031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 4

- **A. Latar Belakang** 4
- **B. Landasan Hukum** 6
- **C. Paradigma Pendidikan dan Pelatihan Guru dan Tenaga Kependidikan** 7
- **D. Kondisi Umum** 9
- **E. Tuntutan dan Tantangan** 17
- **F. Permasalahan** 23

BAB II PROFIL PPPPTK BIDANG MESIN DAN TEKNIK INDUSTRI 28

- **A. Sejarah PPPPTK BMTI** 28
- **B. Keudukan** 30
- **C. Visi dan Misi** 30
- **D. Sumber Daya Manusia dan Struktur Organisasi** 34
- **E. Tujuan Strategis PPPPTK BMTI** 37
- **F. Sasaran Strategis PPPPTK BMTI** 39
- G. **Tata Nimai PPPPTK BMTI** 40

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN 42

- **A. Arah Kebijakan dan Strategi PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri** 42
- **B. Kerangka Regulasi** 46
- **C. Kerangka Kelembagaan** 48

BB IV TARGET KINERJA DAN KERANGA PENDANAAN 49

- **A. Target Kinerja** 49
- **B. Kerangka Pendanaan** 52
- **C. Sistem Pemantauan dan Evaluasi** 53

BAB V PENUTUP 54

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pendidikan pada hakekatnya adalah upaya yang dilakukan oleh semua komponen bangsa Indonesia untuk meningkatkan taraf pendidikan seluruh masyarakat; menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok sosial-ekonomi, antar wilayah dan antar jenis kelamin; dan meningkatkan pembelajaran sepanjang hayat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Keberhasilan pembangunan pendidikan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar program dan kegiatan serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya. Tema pembangunan pendidikan jangka panjang mengacu pada UndangUndang (UU) Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005—2025, pada periode 2015—2019 yang merupakan tahapan ke tiga RPJPN difokuskan pada penyiapan manusia Indonesia untuk memiliki daya saing regional.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015—2019, telah ditetapkan arah pembangunan 2015—2019 yaitu mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong. Untuk mewujudkan itu, maka Norma Pembangunan yang diterapkan dalam RPJMN 2015 —2019 adalah membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat yang diarahkan pada dimensi pembangunan manusia dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat yang menghasilkan manusia-manusia Indonesia unggul. Selanjutnya RPJMN 2015—2019 telah menetapkan Sembilan genda prioritas yang disebut NAWA CITA untuk menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Berpedoman pada itu, dengan melalui proses penyusunan dan penyajian rencana strategis (Renstra) sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menyusun dan menetapkan Renstra Kemendikbud Tahun 2015—2019 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015—2019. Selanjutnya dengan adanya Renstra Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK), PPPPPTK

Bidang Mesin dan Teknik Industri memiliki landasan yang kuat untuk menyusun Renstra Tahun 2015—2019 sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pasal 4 ayat (5) yang menyatakan bahwa Unit Kerja Eselon II menyusun dan menetapkan Renstra untuk masa 5 (lima) tahun dengan mengacu pada Renstra Eselon 1.

Renstra PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri Tahun 2015—2019 ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah lingkup tugas dan fungsi PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri untuk periode 5 (lima) tahun yakni tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang merupakan penjabaran dari Renstra Ditjen GTK dan Kemendikbud, memuat visi, misi, tujuan strategis, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri dalam menjalankan fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkatan Kompetensi Pendidik dan tenaga kependidikan secara tahunan dalam periode pembangunan tahun 2015—2019.

Sebagai penjabaran dari Renstra Ditjen GTK, Renstra PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri memiliki peran dan fungsi yang sangat penting. Renstra ini diharapkan mampu menuntun program unit kerja di PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri dalam pencapaian visi, misi, tujuan strategis, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, program, kegiatan serta indikator kinerja yang telah ditetapkan sehingga menjadi pedoman dalam menyusun

(1) Program kerja unit unit kerja internal;
(2) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
(3) Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
(4) Penetapan Kinerja (PK); dan
(5) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinta (LAKIP).

Penjelasan secara umum mengenai sistematika penulisan Renstra PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri 2015 – 2019 adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Paradigma Pendidikan dan Pelatihan Guru dan Tenaga, Kondisi Umum, Tuntutan dan tantangan, Permasalahan.

BAB II : Profil PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri berisi Sejarah, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Visi dan Misi, Sumber Daya Manusi dan Organisasi, Tujuan Strategis, Sasaran Strategis dan Tata Nilai PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri.

BAB III : Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan, berisi Arah Kebijakan, Strategi yang selanjutnya diimplementasikan ke dalam Kerangka Regulasi dan Kerangka Pendanaan.

BAB IV : Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan, berisi Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Ditjen GTK selama periode perencanaan.

BAB IV : Penutup, berisi simpulan singkat mengenai dokumen Renstra.

B. Landasan Hukum

Reformasi hukum dalam bidang pendidikan seluruhnya mengacu kepada amanat reformasi dalam amandemen Undang-undang dasar 1945 yang selanjutnya dijabarkan ke dalam undang-undang pendidikan, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri yang melandasi penyusunan Renstra PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri ini. Secara rinci landasan hukum tersebut adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan PP. Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
14. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun 2015-2019.

C. Paradigma Pendidikan dan Pelatihan Guru dan Tenaga Kependidikan

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan guru dan tenaga kependidikan didasarkan pada beberapa paradigma baik yang bersifat universal, dikenal dan dipakai berbagai bangsa, maupun bersifat nasional sesuai dengan nilai-nilai dan kondisi bangsa Indonesia. Mengacu pada Renstra Kemendikbud serta Renstra Ditjen GTK Tahun 2015 -2019, Renstra PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri disusun berdasarkan paradigma sebagai berikut:

1. Pendidikan untuk Semua

"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia" adalah amanat konstitusi. Memenuhi amanat konstitusi tersebut, PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri sebagai Unit Pelayanan Teknis dibawah Ditjen GTK memiliki peran untuk memenuhi hak guru dalam mengembangkan diri dan mendapat manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pelatihan yang dapat diakses oleh setiap guru. Peran penting PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri tersebut adalah melaksanakan pendidikan dan pelatihan guru dan tenaga kependidikan tanpa membedakan status ekonomi, kondisi fisik/mental, asal wilayah, gender dan agama dalam rangka mendukung terselenggaranya pendidikan untuk semua.

2. Pendidikan Sepanjang Hayat

Pendidikan merupakan proses yang berlangsung sejak lahir hingga akhir hayat. Pendidikan harus diselenggarakan dengan sistem terbuka yang memungkinkan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program secara lintas satuan dan jalur

pendidikan. Untuk mendukung proses pendidikan tersebut, peningkatan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan dan diselenggarakan dengan sistem terbuka yang dapat diakses oleh semua guru dan tenaga kependidikan merupakan bagian dari tugas PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri antara lain berupa penyiapan sistem pengembangan keprofesian berkelanjutan yang memungkinkan guru dan tenaga kependidikan untuk terus belajar sepanjang hayatnya.

3. Pendidikan sebagai Suatu Gerakan

Pemerintah bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan yang sebaik-baiknya bagi semua warganegara. Namun, semua pihak dapat memberi kontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan agar hasilnya optimal. Penyelenggaraan pendidikan harus disikapi sebagai suatu gerakan, yang mengintegrasikan semua potensi negeri dan peran aktif seluruh masyarakat. Untuk mendukung pendidikan sebagai suatu gerakan, maka PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri berperan mendorong guru dan tenaga kependidikan sebagai motor penggerak peningkatan mutu pendidikan.

4. Pendidikan Menghasilkan Pembelajar

Penyelenggaraan pendidikan berkewajiban memperlakukan, memfasilitasi, dan mendorong peserta didik menjadi subjek pembelajar mandiri yang bertanggung jawab, kreatif dan inovatif. Pendidikan diupayakan menghasilkan insan yang suka belajar dan memiliki kemampuan belajar yang tinggi. Pembelajar harus mampu menyesuaikan diri dan merespons tantangan baru dengan baik. Untuk menghasilkan pembelajar, maka PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri berperan dalam mendorong guru dan tenaga kependidikan untuk selalu meningkatkan kompetensi, kreatifitas dan inovasi yang dapat memotivasi anak didik menjadi insan pembelajar.

5. Pendidikan Membentuk Karakter

Pendidikan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, dan pembentukan kepribadian dengan karakter unggul, antara lain bercirikan kejujuran, berakhlak mulia, mandiri, serta cakap dalam menjalani hidup. Peran PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri dalam mewujudkan karakter unggul tersebut melalui penguatan guru sebagai *role model* dalam membentuk watak dan mengembangkan potensi anak didik agar menjadi manusia yang berkarakter kuat, berpikiran maju dan berpandangan modern, serta berperilaku baik, melalui keteladanan sikap dan perilaku baik bagi

peserta didik.

6. **Sekolah yang Menyenangkan**

   Sekolah sebagai satuan pendidikan utama yang merupakan suatu ekosistem, di dalamnya terjadi hubungan saling ketergantungan antara manusia dengan lingkungannya. Sekolah harus menjadi tempat yang menyenangkan bagi manusia yang berinteraksi di dalamnya, baik siswa, guru, tenaga pendidik, maupun orang tua siswa. Untuk mewujudkan fungsi sekolah tersebut, PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri berperan mendorong Guru dan Tenaga Kependidikan menjadi motor penggerak untuk mewujudkan sekolah yang kondusif melalui penguatan peran kepala sekolah sebagai pemimpin para pelaku pendidikan untuk membuat sekolah yang efektif.

7. **Pendidikan Membangun Kebudayaan**

   Pendidikan memiliki hubungan sangat erat dengan kebudayaan. Sebagian dari paradigma yang disebut di atas mengandung aspek kebudayaan atau proses budaya. Pendidikan pada dasarnya juga merupakan proses membangun kebudayaan atau membentuk peradaban. Untuk mewujudkan hal tersebut, PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri sebagai UPT dibawah koordinasi Ditjen GTK berperan mendorong guru dan tenaga kependidikan membangun budaya kerja sesuai standar kinerja yang diharapkan, melalui berbagai program dan kegiatan.

D. Kondisi Umum

1. Kondisi Internal

a. Bidang Garapan dan Wilayah Mitra SMK

   Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menangani SMK Bidang Teknologi Rekayasa dalam peningkatan kompetensi guru-guru SMK ada 3 (tiga) lembaga. Dimana masing-masing PPPPTK memiliki garapan utama dan garapan khusus (Gambar 1). PPPPTK BMTI memiliki garapan utama untuk Teknik Pemesinan dan Teknik Industri sedangkan garapan khusus pada kompetensi keahlian Teknik Intsrumentasi Industri, Teknik Energi Terbarukan, Teknik Pesawat Udara dan Teknik Tekstil.

PENJAB PROGRAM KEAHLIAN
PPPPTK TEKNOLOGI

PPPPTK BMTI		PPPPTK BOE		PPPPTK BBL	
Garapan Utama		**Garapan Utama**		**Garapan Utama**	
1.	**Teknik Mesin**	1.	Teknik Otomotif	1.	Teknik Bangunan
2.	**Teknik Industri**	2.	Teknik Elektronika	2.	Teknik Ketenagalistrikan
Garapan Khusus		**Garapan Khusus**		**Garapan Khusus**	
3.	Teknik Instrumentasi Industri	1.	Teknik Perkapalan	3.	Teknik Furniture
4.	Teknik Energi Terbarukan	2.	Teknik Telekomunikasi	4.	Teknik Plambing & Sanitasi
5.	Teknik Pesawat Udara			5.	Geomatika
6.	Teknologi Tekstil			6.	Geologi Pertambangan
				7.	Teknik Perminyakan

Gambar 1. Penjab Program Keahlian

Peningkatan Kompetensi Berkelanjutan (PKB) pada kompetensi di garapan utama dibagi berdasarkan wilayah binaan masing-masing PPPPTK (Gambar 2). Sementara itu, kompetensi keahlian pada garapan khusus dilaksanakan oleh masing-masing PPPPTK.

Untuk PKB mata pelajaran (mapel) Matematika dan Kewirausahaan (Gambar 3), peningkatan kompetensi gurunya berbagi dengan 6 (enam) PPPPTK dan 1 (satu) LP3TK KPTK. Pembagian ini dilakukan guna memudahkan dalam kegiatan Diklat dan pemetaan di Sistem Informasi Manajemen PKB (SIM PKB).

WILAYAH Mitra GP Bidang Teknologi & Rekayasa (TR)

Mapel : Fisika (TR), Kimia (TR) dan Matematika (TR)

Program Keahlian : Teknik Bangunan, Teknik Elektronika, Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Mesin, Teknik Otomotif, Teknik Pesawat Udara, Teknologi Tekstil, Teknik Industri, Teknik Intrumenstasi Industri)

PPPPTK BMTI BANDUNG

No.	Provinsi
1.	Bali
2.	Banten
3.	DKI Jakarta
4.	Gorontalo
5.	Jawa Barat
6.	Kalimantan Timur
7.	Kalimantan Tengah
8.	Kalimantan Utara
9.	Lampung
10.	Sulawesi Utara
11.	Sulawesi Tengah
12.	Sulawesi Tenggara

PPPPTK BOE MALANG

No.	Provinsi
1.	DI. Yogyakarta
2.	Jawa Tengah
3.	Jawa Timur
4.	Maluku
5.	Maluku Utara
6.	Nusa Tenggara Barat
7.	Nusa Tenggara Timur
8.	Papua
9.	Papua Barat
10.	Sulawesi Barat
11.	Sulawesi Selatan

PPPPTK BBL MEDAN

No.	Provinsi
1.	Aceh
2.	Bangka Belitung
3.	Bengkulu
4.	Jambi
5.	Kalimantan Barat
6.	Kalimantan Selatan
7.	Kepulauan Riau
8.	Riau
9.	Sumatera Barat
10.	Sumatera Utara
11.	Sumatera Selatan

Gambar 2. Wilayah Mitra SMK Bidang Teknologi dan Rekayasa

WILAYAH Mitra GP Matematika & Kewirausahaan

PPPPTK BMTI

No.	Provinsi
1.	DKI Jakarta
2.	Jawa Barat
3.	Kalimantan Timur
4.	Kalimantan Tengah
5.	Kalimantan Utara
6.	Lampung

PPPPTK BISPAR

No.	Provinsi
1.	Bali
2.	Banten
3.	Sulawesi Utara
4.	Kalimantan Selatan
5.	Kepulauan Riau
6.	Nusa Tenggara Barat

PPPPTK PERTANIAN

No.	Provinsi
1.	DI. Yogyakarta
2.	Sumatera Selatan
3.	Papua
4.	Sulawesi Selatan
5.	Sulawesi Tenggara

PPPPTK BBL MEDAN

No.	Provinsi
1.	Aceh
2.	Bangka Belitung
3.	Jambi
4.	Kalimantan Barat
5.	Riau
6.	Sumatera Barat
7.	Sumatera Utara

PPPPTK SENI BUDAYA

No.	Provinsi
1.	Jawa Tengah
2.	Bengkulu
3.	Papua Barat
4.	Sulawesi Barat

LP3TK KPTK

No.	Provinsi
1.	Gorontalo
2.	Sulawesi Tengah

PPPPTK BOE

No.	Provinsi
1.	Jawa Timur
2.	Maluku
3.	Maluku Utara
4.	Nusa Tenggara Timur

Gambar 3. Wilayah Mitra Guru Matematika dan Kewirausahaan

b. Jenis dan Sasaran Diklat

PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan 2015 telah melaksanakan diklat PKB sebanyak 46.070 orang. Tahun 2014 dan 2015, terjadi peningkatan yang sangat signifikan dalam diklat guru. Peningkatan jumlah yang cukup besar dapat terlaksana karena menggunakan sistem Daring dalam pelaksanaan Diklat PKB.

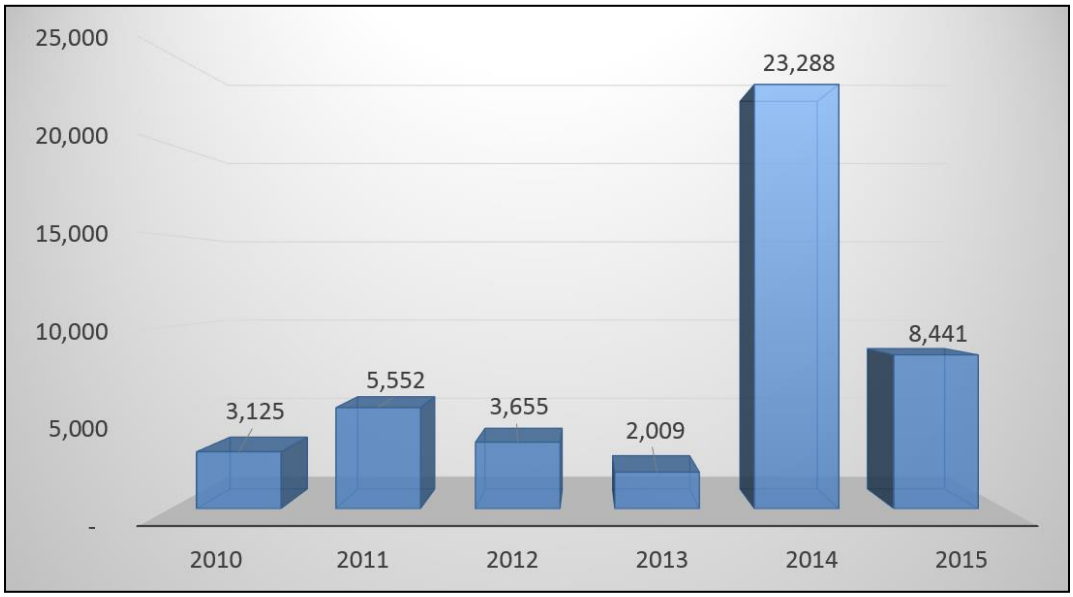

Gambar 4. Rekapitulasi Peserta Diklat PPPPTK BMTI

Sedangkan jumlah sasaran yang akan dikerjakan berdasarkan hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) tahun 2015 berdasarkan paket keahlian dan mapel pada SMK Bidang Teknologi dan Rekayasa seperti yang ditujukan pada tabel 1.

Tabel 1.1 Jumlah Guru Sasaran Menurut Moda PKB berdasarkan Hasil UKG

NO.	PROPINSI	PRODUKTIF					NORMATIF & ADAPTIF					
		TM	DK	DP	IN	JML	TM	DK	DP	IN	JML	Total
1	Bali	71	108	140	26	345	8	28	51	23	110	455
2	Banten	281	183	154	26	644	48	51	75	16	190	834
3	DKI Jakarta	330	207	231	35	803	292	442	541	119	1,394	2,197
4	Gorontalo	40	33	17	2	92	19	18	8	-	45	137
5	Jawa Barat	1,309	1,140	1,057	189	3,695	1,772	1,722	1,882	403	5,779	9,474
6	Kalimantan Tengah	53	49	54	5	161	118	96	70	20	304	465
7	Kalimantan Timur	190	144	105	16	455	164	199	179	48	590	1,045
8	Kalimantan Utara	22	21	26	4	73	30	23	30	4	87	160
9	Lampung	350	224	175	28	777	350	362	268	63	1,043	1,820
10	Sulawesi Tengah	86	60	55	3	204	31	24	8	-	63	267
11	Sulawesi Tenggara	106	76	49	4	235	33	23	16	1	73	308
12	Sulawesi Utara	120	82	56	8	266	34	24	16	4	78	344
Grand Total		**2,958**	**2,327**	**2,119**	**346**	**7,750**	**2,899**	**3,012**	**3,144**	**701**	**9,746**	**17,506**

Uji kompetensi Guru merupakan perangkat untuk melakukan evaluasi atas kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing guru. Dalam evaluasi tersebut terdiri dari evaluasi kompetensi pedagogik dan professional yang terbagi atas 10 (sepuluh) modul. Hasilnya UKG peserta dipetakan sesuai dengan hasil evaluasi. Peserta yang tidak memenuhi Kriteria Capaian Minimal (KCM) dikelompokkan dalam moda diklat sebagai berikut:

1) Moda Tatap Muka (TM) adalah peserta yang tidak memenuhi 8 s.d 10 KCM;
2) Moda Daring Kombinasi (DK) adalah peserta yang tidak memenuhi 6 s.d 7 KCM;
3) Moda Daring Penuh (DP) adalah peserta yang tidak memenuhi 3 s.d 5 KCM; dan
4) Moda Calon Instruktur Nasional (IN) adalah peserta yang tidak memenuhi 2 s.d 0 KCM.

Pengelompokan moda PKB akan mempermudah dalam pemetaan peserta diklat berdasarkan kemampuan masing-masing peserta sehingga pelatihan lebih tepat sasaran sesuai dengan hasil UKG.

c. Kondisi SDM PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri

Peningkatan mutu SDM PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri dilakukan melalui peningkatan kualifikasi dengan memberikan beasiswa untuk mengikuti peningkatan jenjang pendidikan atau melalui peningkatan kompetensi melalui kegiatan diklat, magang, seminar serta melalui kegiatan melakukan ujicoba proses produksi serta pengembangan inovasi.

Capaian Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi SDM PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri sampai tahun 2015 berdasarkan jenjang pendidikan pada periode Renstra sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut:

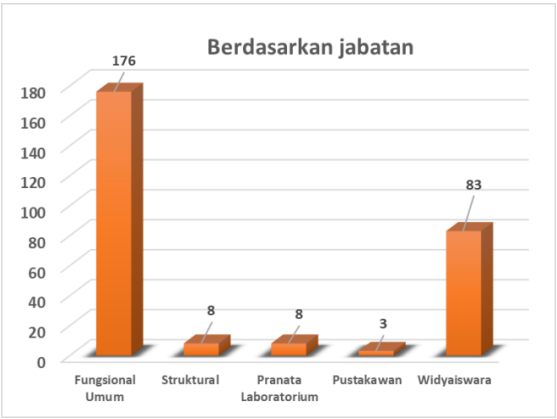

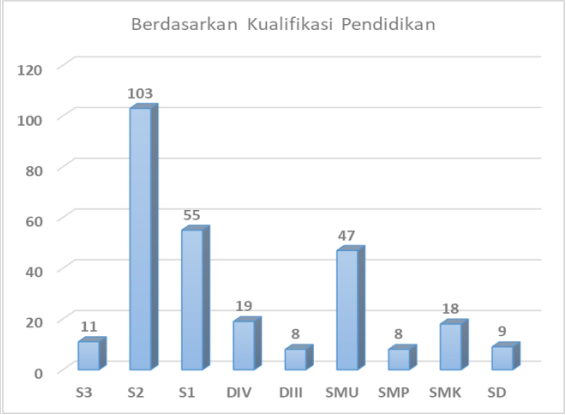

Jumlah SDM secara keseluruhan adalah 278 dengan rincian sebagai berikut:

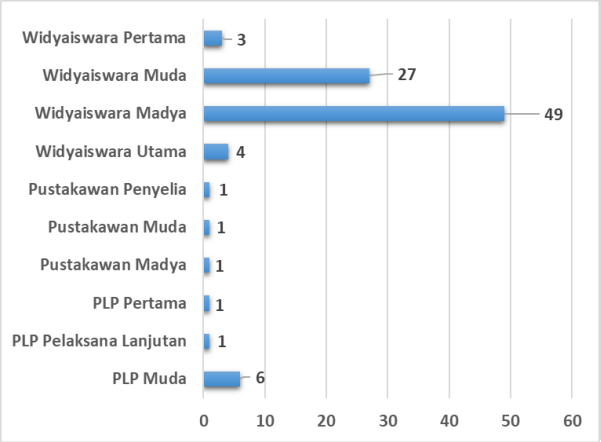

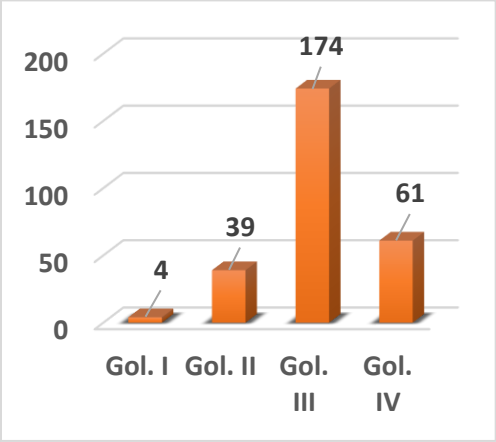

d. Kondisi Bahan Ajar/Modul

Secara kuantitas bahan ajar/modul yang telah berhasil disusun hingga periode Renstra 2015-2017 adalah sejumlah 270 modul program guru pembelajar untuk Bidang Teknologi dan Rekayasa, khususnya Program Keahlian Teknik Mesin dan Teknik Industri. Modul-modul tersebut untuk 10 (sepuluh) tingkatan Diklat PKB yang dikelompokan dalam moda diklat sebagai berikut:

1) Moda Tatap Muka (TM);
2) Moda Daring Kombinasi (DK);
3) Moda Daring Penuh (DP); dan
4) Moda Calon Instruktur Nasional (IN).

Data di atas merupakan "kekuatan" lembaga yang dapat dijadikan modal dasar dalam mengemban tugas dan fungsinya. Selain hal tersebut diatas kekuatan yang dimiliki oleh PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri adalah pengalaman melakukan pendidikan dan pelatihan yang telah dilaksanakan sejak tahun 1992 sampai dengan sekarang baik untuk diklat PTK bidang Bidang Mesin dan Teknik Industri, diklat pedagogik bagi guru Sekolah Dasar, Diklat Pasca UKG maupun diklat bagi persiapan purna tugas dari berbagai instansi.

PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri sebagai lembaga diklat kejuruan, penyelenggaraan diklatnya sangat diwarnai dengan kegiatan-kegiatan praktek dilapangan dan atau di laboratorium. Kegiatan praktek ini sangat ditunjang oleh kegiatan produktif di lapangan, baik kegiatan uji coba produksi maupun kegiatan pengembangan inovasi teknologi. Namun saat ini kegiatan produktif dilapangan banyak mengalami kendala yang disebabkan beberapa hal, antara lain adalah semakin berkurangnya tenaga teknisi lapangan sebagai akibat dari berkembangnya SDM yang semula teknisi (lulusan SMP/SMA/SMK) saat ini sudah berpendidikan S-1 dan S-2, kurangnya fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan dalam kegiatan lapangan serta semakin berkurangnya minat untuk melakukan kegiatan produktif dilapangan. Hal ini merupakan "kelemahan" lembaga yang harus segera diatasi.

2. Kondisi Eksternal

Dalam menjalankan tugas pokok, PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri sangat

dipengaruhi oleh situasi dan kondisi eksternal, baik yang berpengaruh positif maupun yang bepengaruh negatif. Kondisi eksternal yang berpengaruh positif merupakan "peluang" bagi PPPPT Bidang Mesin dan Teknik Industri dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai Visinya. Peluang tersebut antara lain adalah:

a. Komitmen pemerintah untuk memenuhi anggaran pendidikan berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi RI No. 13/PUU-VI/2008 sesuai dengan amandemen ke 4 UUD 1945 pasal 31 ayat 4 yaitu negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
b. Belum semua satuan pendidikan memiliki tenaga kependidikan yang memadai seperti pustakawan, tenaga laboratorium, Kepala sekolah yang berlisensi kepala sekolah dan pengawas yang berlisensi pengawas.
c. Kemajuan Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK) membuka peluang terhadap pengayaan materi ajar dan menjangkau daerah-daerah yang tidak terjangkau serta mendukung efisiensi pengelolaan e-administrasi pendidikan
d. Besarnya komitmen masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung pembangunan pendidikan antara lain melalui Corporate Social Responsibility (CSR)
e. Kuatnya dukungan lembaga legislatif dan pemerintah terhadap pembangunan pendidikan, khususnya peningkatan kualifikasi dan sertifikasi guru.

Kondisi eksternal yang dapat menghambat dan merupakan "ancaman" bagi PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya antara lain

a. Disatu sisi anggaran pendidikan semakin meningkat yaitu menjadi 20 % dari APBN, tetapi kenaikan anggaran pendidikan lebih banyak untuk keperluan pemenuhan tunjangan profesi Guru. Kepala sekolah dan Pengawas namun demikian tunjangan profesi tersebut belum memberikan dampak yang significant terhadap kinerja Guru, Kepala sekolah dan Pengawas.
b. Otonomi yang luas kepada daerah diatur dengan UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian diatur kembali dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pendidikan yang semula menjadi kewenangan pemerintah pusat kemudiadialihkan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Kondisi ini berdampak kepada adanya kewenangan Pemerintah daerah untuk mengatur sendiri bagaimana

meningkatkan mutu PTK-nya. Sementara itu, koordinasi dan sinkronisasi program dengan pemerintah daerah memerlukan biaya dan waktu serta tantangan tersendiri.

E. Tuntutan dan Tantangan

Berdasarkan hasil analisi kondisi internal dan eksternal dapat diidentifikasi berbagai tuntutan dan tantangan yang dihadapi dan harus diatasi dalam melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan lima tahun kedepan meliputi:

1. Tuntutan Era Global

Era global yang ditandai dengan demokratisasi, keterbukaan, budaya mutu, dan akuntabilitas publik berpengaruh sangat luas dan beragam dalam dunia pendidikan. Pada sisi lain, era yang seakan tanpa batas yang ditunjang oleh berkembangnya teknologi informasi dan transportasi telah mempercepat arus informasi pendidikan antarnegara. Era ini telah menimbulkan berbagai tuntutan peningkatan mutu pendidikan dan pelatihan yang mampu

a. mencetak SDM yang komunikatif dan memiliki kemampuan yang handal dalam mengakses informasi;
b. menciptakan SDM yang memiliki mobilitas tinggi;
c. menciptakan SDM dengan kemampuan adaptasi yang kuat;
d. menciptakan SDM yang berkualitas, kreatif, dan inovatif;
e. mewujudkan SDM yang memiliki keunggulan pada bidangnya; dan
f. membentuk SDM yang mampu bersaing pada bursa tenaga kerja global.

Tuntutan tersebut merupakan tantangan bagi PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri untuk senantiasa mengembangkan berbagai inovasi kediklatan dan meningkatkan kualitas SDM yang dimiliki sesuai dengan tuntutan globalisasi tersebut.

2. Tuntutan Standardisasi Nasional Pendidikan

Dalam UURI Nomor 20 tahun 2003, tentang *Sistem Pendidikan Nasional* khususnya pada Bab IX *Standar Nasional Pendidikan,* pasal 35 ditegaskan bahwa pemerintah pusat menetapkan standar nasional pendidikan. Sementara itu *Pendidik dan Tenaga Kependidikan,* pasal 44 dinyatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dalam konteks itu, pemerintah perlu mengembangkan berbagai strategi implementasi yang berkenaan dengan penerapan Standar Nasional Pendidikan (SNP), khususnya pendidikan dasar dan menengah, baik dalam organisasi dan manajemen, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, fasilitas, maupun lingkungan. Hal itu merupakan tantangan sekaligus peluang yang sangat strategis bagi PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri untuk berperan aktif dalam pengembangan dan penerapan standar-standar penyusunan pendidikan, antara lain mengembangkan Pusat Pengujian *(Assessment Center)* kompetensi.

3. **Tuntutan Perkembangan IImu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek)**

   Pengalaman empirik menunjukkan bahwa perkembangan Iptek, khususnya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) tidak pernah berhenti. Perkembangan Iptek akan terus berkembang sangat pesat dan hasilnya sangat mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan sehari-hari.

   Berdasarkan hasil-hasil perkembangan Iptek, manusia merajut prestasi gemilang dalam berbagai sektor, termasuk dalam sektor pendidikan. Pada masa mendatang, teknologi informasi akan semakin mewarnai berbagai peradaban manusia, khususnya dalam bidang pendidikan. Dalam konteks itu diperlukan suatu lembaga yang memiliki tugas pengembangan dalam bidang pendidikan yang mampu melakukan transfer Iptek dalam kerangka penciptaan manusia Indonesia seutuhnya yang cerdas, canggih dalam Iptek, elok, unggul, dan berbudi pekerti luhur.

4. **Tuntutan Mutu Layanan Peningkatan Kompetensi**

   Peningkatan mutu layanan diklat bukan lagi merupakan fenomena baru di kalangan masyarakat pada dasawarsa terakhir. Masyarakat menghendaki adanya satuan-satuan diklat pada berbagai jenis dan jenjang yang terstandar, kredibel, transparan, dan akuntabel. Sementara ini, satuan diklat seperti itu relatif masih terbatas. Ke depan, tuntutan masyarakat terhadap peningkatan mutu diklat niscaya semakin meningkat. Karenanya diperlukan suatu lembaga yang mampu mengembangkan mutu diklat dasar dan menengah secara profesional dan mengacu pada standar nasional dan internasional.

5. **Tuntutan Mutu Layanan Pengkajian dan Pengembangan Program**

   Ada tiga pilar kebijakan yang sudah dijabarkan ke dalam Renstra Diknas dan hierarki birokrasi di bawahnya, serta banyak rencana dan program jangka panjang (renstra) dan jangka pendek yang menuntut tampilnya peran PPPPTK sebagai institusi untuk mengkaji

berbagai isu strategis yang selanjutnya hasil pengkajian tersebut dapat dijadikan bahan masukan terhadap hierarki birokrasi terkait dalam mengambil langkah operasional sehingga dampak negatif dari implementasi kebijakan dapat diminimalkan.

Tuntutan lain bahwa PPPPTK BMTI sebagai institusi yang berperan sebagai *think-tank* PMPTK juga dituntut untuk memberi bantuan pemikiran dan teknis kepada Ditjen PMPTK, yang akan menjadi mediator, fasilitator sekaligus sebagai pelaksana lapangan yang berhadapan langsung dengan *customer* yang dilayani. PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri harus dapat memberikan mutu layanan yang tidak membosankan dan pendampingan dalam memecahkan permasalahan yang terjadi di sekolah. Karena itu PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri harus mampu melakukan berbagai inovasi pendidikan dan mengemasnya ke dalam berbagai program pengembangan, sehingga eksistensi dan kontribusinya dapat dirasakan oleh wilayah dan sekolah. PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri diharapkan juga menjadi institusi dengan dinamika dan mobilitas yang tinggi serta tidak terjebak sebagai institusi yang konvensional dan tradisional, tetapi sebaliknya senantiasa menjadi *pemicu* untuk akselerasi peningkatan mutu dan kinerja dengan program inovasi yang terlahir dari PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri.

6. Tuntutan Peningkatan Mutu Sekolah

Dalam konteks ini suka atau tidak suka PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri harus berperan dalam pengendalian mutu secara tersistem atau parsial. Pengendalian mutu di dalam konteks implementasi di sekolah akan berkaitan dengan komponen pembelajaran yang meliputi (1) aspek *input,* antara lain yang terdiri dari siswa, pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum, sarana dan prasarana, manajemen, dan anggaran; (2) aspek proses, antara lain PBM, penilaian dan sertifikasi; dan (3) aspek *output,* yaitu lulusan dan pemasarannya.

Penjaminan mutu artinya merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi semua komponen tersebut di atas sehingga dapat menghasilkan produk/output yang bermutu sesuai standar yang dirumuskan oleh BSNP dan BNSP.

7. Tuntutan Era Otonomi Daerah

Kebijakan yang lahir dari otonomi daerah banyak berpengaruh terhadap strategi pengembangan SDM dan kinerja sekolah. Belum lagi jumlah sekolah yang harus dilayani akan bertambah jumlahnya dan tidak berimbang dengan jumlah lembaga diklat dan

lembaga penjaminan mutu. Lembaga yang dibentuk di wilayah sebagai institusi atau lembaga diklat banyak yang belum mapan dan siap untuk memberikan layanan yang bermutu. Karenanya PPPPTK BMTI harus siap memberikan layanan pendampingan dan konsultansi secara langsung ke sekolah atau bermitra dan bekerja sama sekaligus membina institusi yang ada di wilayah yang mempunyai fungsi dan peran pembinaan dan pengembangan sekolah (contoh : dinas, LPMP, pusdiklat, dan LPTK/perguruan tinggi).

8. **Tuntutan Sertifikasi Kompetensi**

Lahirnya UU ketenagakerjaan No.13 menuntut tenaga teknisi/operator di Indonesia harus mempunyai dan lolos sertifikasi kompetensi yang sistem prosedurnya dilakukan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK).

Begitu juga guru, dengan lahirnya UU Guru dan Dosen maka harus melalui pendidikan profesi dan mempunyai sertifikat kompetensi serta pendidikan kualifikasi minimal D4/S1. Maka hal ini akan menuntut peran PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri untuk mempunyai TUK sekaligus sebagai pembina untuk lahirnya TUK-TUK di sekolah. Dalam hal tuntutan pendidikan profesi dan tuntutan sertifikasi, PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri dituntut untuk bekerja sama dengan LPTK untuk melakukan konsorsium dengan pihak-pihak yang diberi kewenangan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi guru.

9. **Tuntutan Percepatan Peningkatan Kompetensi**

Indonesia memiliki 2.783.321 orang pendidik dan 280.623 sekolah yang tersebar seluruh wilayah yang meliputi 33 provinsi dan 501 kabupaten/kota. Dari semua pendidik yang sekarang ada, 62,5% tidak memiliki kualifikasi DIV/S1 sebagaimana yang dipersyaratkan Undang-undang Guru dan Dosen serta tidak semua memiliki sertifikat pendidik yang mengacu kepada empat pilar kompetensi yaitu pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Berdasarkan isu-isu nasional yang berkembang, kinerja dan kompetensi guru masih rendah terbukti dengan masih rendahnya kualitas lulusan dari setiap jenjang pendidikan, walaupun pemerintah telah melakukan berbagai usaha antara lain dengan melaksanakan sertifikasi guru dalam jabatan serta meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga diklat formal dan nonformal pada tataran pusat dan wilayah. Dalam kenyataannya dari tahun ke tahun target dan sasaran peningkatan kompetensi guru persentasenya sangat rendah sehingga perlu ada pemikiran bagaimana meningkatkan percepatan peningkatan kompetensi

guru dari sisi kualitas maupun kuantitas.

10. Tuntutan Pengembangan Sistem dan Model Pembelajaran

Sistem dibentuk oleh komponen-komponen yang saling berinteraksi, berketergantungan, atau berhubungan satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan pembelajaran menurut Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 adalah proses interaksi antara peserta didik dan pendidik serta sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Berdasarkan konsep tersebut dalam kaitan pembelajaran terkandung dua kegiatan, yaitu belajar dan mengajar yang tujuannya agar terjadi perubahan perilaku dari peserta didik yang ditunjukkan dengan kemampuan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang produktif dan bermanfaat untuk kepentingan dirinya dan masyarakat umum, maka sistem dan model pembelajaran menyangkut pengorganisasian dari perpaduan antara manusia, pengalaman belajar, fasilitas, pengawasan, serta prosedur yang mengatur interaksi perilaku pembelajaran.

Dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran khususnya peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, sistem dan model pembelajaran harus selalu dikembangkan sehingga dapat diidentifikasi, direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi keterlaksanaannya.

Banyak sistem dan model pembelajaran yang telah dikembangkan oleh diknas antara lain *production based learning, competency based learning, lesson study*, pembelajaran aktif, kreatif efektif, dan menyenangkan (PAKEM), *Creative Learning Comunities for Children* (CLCC), termasuk strategi pelaksanaannya.

Sampai sejauh ini, belum ada suatu kajian dan penelitian terhadap efektivitas sistem dan model tersebut terhadap peningkatan mutu pembelajaran. Hal tersebut menjadi tantangan bagi PPPPTK BMTI untuk senantiasa melakukan kajian lebih lanjut pada tataran operasional di lapangan/sekolah.

Adapun **Tantangan** yang akan dihadapi adalah:

1. Perkembangan capaian peningkatan kompetensi guru produktif Bidang Teknologi Teknologi dan Rekayasa dari Tahun 2015 sampai dengan 2019 sasaran sebanyak 24174 guru melalui 3 moda (Moda tatap muka, Moda dalam jaringan, dan Moda kombinasi). Pada tahun 2015 akan dilakukan PKB sebanyak 2621 guru, pada tahun 2016 akan dilakukan PKB sebanyak 11795 guru, Tahun 2017 akan dilakukan PKB sebanyak 3623 guru. Rencana 2018 dilakukan PKB sebanyak 2635 guru, Pada Tahun 2019 mata

pelajaran produktif Bidang Teknologi dan Rekayasa akan dilakukan PKB sebanyak 3500 guru.

2. Sertifikasi secara finansial telah meningkatkan ekonomi tenaga pendidik, namun belum sejalan dengan peningkatan kinerja dan kompetensi. Lima tahun kedepan dampak dari sertifikasi harus berdampak terhadap peningkatan mutu pendidikan.
3. Implementasi Kurikulum 2013 menuntut perubahan perilaku guru dalam melakukan pembelajaran saintifik dan penilaian otentik berdasarkan tuntutan kompetensi abad 21, literasi, HOTS, dan pendidikan karakter. Perubahan tersebut memerlukan pembiasaan secara berkala baik melalui pelatihan maupun pendampingan. oleh karena itu perlu upaya serius meningkatkan kompetensi pedagogik guru untuk menjawab keberhasilan implementasi Kurikulum 2013.
4. Optimalisasi penerapan Kurikulum pada Satuan Pendidikan menuntut peran Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam sosialisasi dan implementasi Kurikulum 2013.
5. Lembaga pelaksana pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan seperti PPPPTK perlu melakukan pembinaan sekolah sebagai satu kesatuan sistem peningkatan mutu, sehingga perlu revitalisasi perluasan peran dan fungsi.
6. Memenuhi komitmen global (*Millenium development goals, Education for all,* dan *Education for sustainable development*).
7. Adanya kebijakan pengembangan dan pemberdayaan PTK/PPPPTK yang berbasis pada kinerja.
8. Mempertahankan peningkatan kualitas pendidikan dalam upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal antar gender dan antar wilayah dengan pendekatan penerapan sistem manajemen mutu dalam peningkatan berkelanjutan (*Continuous improvement*).
9. Peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mampu bersaing secara global.
10. Peningkatan kemitraan yang sinergis dengan dunia usaha/industri, organisasi masyarakat dan organisasi profesi.
11. Peningkatan koordinasi yang efektif dengan lembaga terkait dan pemerintah daerah.
12. Adanya kebijakan yang mengintegrasikan muatan karakter bangsa. Kebanggaan warga Negara, peduli lingkungan dan peduli ketertiban dalam penyelenggaraan pendidikan.
13. Adanya kebijakan yang terkait dengan pemanfaatan ICT dalam bidang pendidikan.
14. Perbaikan dan penataan ulang internal, baik dalam hal sumberdaya manusia (SDM) maupun fasilitas dan infrastruktur.

Kekurangan guru produktif terkait dengan adanya kebijakan rasio antara SMA dan SMK 40 berbanding 60 sebagai dampak dari Instruksi Presiden Nomor 9 (Sembilan) tahun 2016.

F. Permasalahan

1. Permasalahan Internal

a. Sumber Daya Manusia

Harus diakui bahwa PPPPTK BMTI mencapai masa keemasannya pada dekade pertama berdirinya karena beberapa faktor, yaitu sumber daya manusia yang direkrut saat berdirinya lembaga ini memiliki idealisme yang tinggi, semangat juang (*fighting spirit*) yang tinggi, masih berusia muda, sehingga cukup energik dan relatif belum memiliki beban (tanggungan keluarga) yang berat, dan masih berada pada tataran kebutuhan hidup yang menurut Abraham Maslow belum pada tingkat aktualisasi diri (*self actualization*). Ditunjang oleh dana pengembangan yang besar, kepemimpinan yang kuat, solid, transformatif, dan visioner, membawa lembaga ini mencapai masa kejayaannya di tahun 1980-an.

Program pelatihan staf di dalam dan luar negeri telah memberikan dampak besar bagi kemajuan PPPPTK BMTI. Namun pada dekade kedua terjadi ketidakseimbangan kecepatan dan kesesuaian program pengembangan staf dengan perkembangan teknologi, hampir menyebabkan terjadinya stagnasi dalam pengembangan lembaga. Sementara itu, selama beberapa tahun, pemerintah memberlakukan kebijakan *zero growth,* yakni tidak ada pengangkatan pegawai baru. Akibat dari kebijakan ini, lembaga tidak ada kaderisasi staf, sehingga terjadi kesenjangan baik dari segi jumlah maupun mutu. Permasalahan lain adalah jumlah dan proporsi SDM di PPPPTK yang tidak seimbang antara staf administrasi dan tenaga fungsional. Saat ini terdapat 271 orang staf administrasi, sedangkan tenaga fungsional berjumlah 100 orang. Hal ini tidak sesuai dengan tupoksi lembaga sebagai institusi fungsional. Peningkatan kualifikasi tenaga fungsional telah dilakukan secara terprogram namun pelatihan peningkatan kompetensi belum dirancang dan dilaksanakan secara sistematis. Orientasi pengembangan sumber daya manusia masih kepada pengembangan akademis.

b. Organisasi dan Manajemen

Secara teoritis, perilaku organisasi ditentukan oleh perilaku individu dan perilaku kelompok. Artinya gaya dan perilaku individu dan kelompok akan membentuk perilaku organisasi. Selama kurang lebih 10 tahun PPPPTK BMTI dipimpin dengan gaya kepemimpinan yang kharismatik dan paternalistik, telah mengilhami, mempengaruhi, dan mewarnai pola pikir karyawan, dan peserta diklat. Pemimpin terdahulu dapat dikatakan telah melakukan transformasi perilaku dan budaya kerja karyawan. Pemimpin saat itu kadang-kadang mampu bersikap sebagai bos, kepala, manager, pemimpin, sahabat, guru, teman, dan bapak bagi karyawan pada saat yang bersamaan. Itulah gaya yang paling sesuai dengan kondisi saat itu. Dan itulah kelemahan kepemimpinan kharismatik, karena tidak dapat dikembangkan menjadi sebuah sistem.

Akibatnya transformasi budaya tersebut pada saat itu tidak masuk ke alam subjektif karyawan sehingga tidak bersifat permanen untuk jangka waktu yang lama. Dengan kata lain kaderisasi kepemimpinan kurang berhasil dilaksanakan. Selain itu dengan perubahan struktur organisasi dan gaya kepemimpinan, transformasi perilaku dan budaya yang diwariskan belum mampu mendorong dan memperkuat perilaku kolektif karyawan. Hal ini didorong oleh dampak globalisasi dan budaya konsumerisme yang mengalir deras di awal tahun 1990-an. Perlahan-lahan, rasa kebersamaan semakin berkurang, tergantikan dengan prinsip individualistis, materialistis, dan cenderung hedonis. Kekurangmampuan lembaga untuk melakukan pemberdayaan staf juga merupakan salah satu sebab mengapa SDM yang berjumlah kurang lebih 278 orang belum mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi kemajuan lembaga ini.

Meski telah meraih sertifikat ISO 9001:2000, PPPPTK BMTI ternyata dalam pelaksanaan tugasnya belum mampu menjamin terciptanya kualitas pelayanan yang memenuhi harapan pelanggan. Hal ini disebabkan belum konsistennya sebagian besar para pengambil keputusan mengikuti prosedur kerja dalam menjalankan tugasnya. Kepentingan individu dan kelompok masih menjadi pertimbangan utama.

c. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana praktek yang ada, termasuk fasilitas peralatan bengkel sudah *out of date* (berumur lebih 20 tahun) sebagian komponen banyak yang aus, hilang, dan sulit dicari komponen penggantinya, serta beberapa mesin sudah sulit dirawat karena sistem dan spesifikasinya sudah sulit dipelajari. Akhir-akhir ini telah dilakukan

penambahan peralatan yang didanai dari APBN namun, belum mampu menjawab persoalan dan tantangan lapangan karena fakta yang ada yaitu:

1) Banyak SMK yang memiliki peralatan lebih modern.
2) Peralatan yang dimiliki PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri jauh ketinggalan dengan *trend* tuntutan industri.
3) Dalam spektrum baru terdapat beberapa program keahlian dan kompetensi keahlian yang memerlukan pengembangan program dan penataan paket peralatan dalam rangka meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
4) PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri sudah berikrar mempunyai program-program unggulan antara lain meliputi; pengembangan alat berat, REP, PTD, Teknik Industri (Teknik Pelayanan Produksi, dan Teknik Manajemen Pergudangan), CNC, otomasi, pembangkitan dan distribusi tenaga listrik. Program-program tersebut belum didukung oleh *workshop* dan fasilitas praktek yang memadai.
5) PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri telah mengembangkan tempat uji kompetensi (TUK) meliputi; LMI Logam yang diakreditasi oleh LSP Logam Mesin, TUK Mekanik Otomotif diakreditasi oleh LSPTO, BSK Bidang Arsitektur dan Teknik Sipil diakreditasi oleh LPJKN/LPJKD serta TUK Geomatika yang diakreditasi oleh LSP Geomatika. Kedudukan, fungsi, dan peran TUK tersebut sangat strategis dalam rangka meningkatkan kompetensi pendidik berstandar nasional. Agar TUK-TUK tersebut dapat melaksanakan perannya dengan lebih profesional perlu didukung oleh paket-paket peralatan yang valid dan terstandar.

Kondisi-kondisi tersebut di atas memerlukan antisipasi dukungan peralatan yang memadai agar PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri dapat melaksanakan fungsi dan perannya lebih profesional dalam meningkatkan kompetensi PTK.

d. Aspek Finansial

Ketersediaan dana pada waktu dan dalam jumlah yang sesuai merupakan faktor penunjang dan menentukan dalam pencapaian program. Beberapa tahun terakhir ini banyak program, baik program rutin maupun program pengembangan tidak dapat terlaksana secara optimal karena keterbatasan dana, dan ketidaktepatan waktu distribusi meskipun dari segi nominal anggaran mengalami kenaikan. Kendala dana sering menjadi *apology* atas ketidakterlaksanaan suatu program. Karena kendala utama ketidakterlaksanaan suatu program adalah sistem pengelolaan dana yang belum handal, transparan, akomodatif dan responsif, serta akuntabel. Hal ini

mempengaruhi kinerja lembaga, sehingga harus diperbaiki dan ditingkatkan kualitas pengelolaannya.

e. Program

Program pelatihan tingkat tinggi yang ditawarkan kurang inovatif dikarenakan belum dapat menjawab kebutuhan peningkatan kompetensi yang berstandar industri, rendahnya mutu pelayanan kepada peserta serta kurangnya analisis kebutuhan diklat yang benar-benar dibutuhkan sekolah. Karena itu, program-program yang berkualitas dan mutu layanan kepada peserta harus benar-benar mendapat prioritas lembaga. Sejalan dengan tuntutan UU No 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, maka program diklat yang dikembangkan PTK mengarah kepada pencapaian kualitas dan kuantitas sertifikasi dan kompetensi guru. Demikian juga untuk mendukung kebijakan peningkatan proporsi jumlah SMK, maka pengembangan dan inovasi program untuk peningkatan kompetensi PTK yang diperlukan harus diperkuat. Sekarang ini PPPPTK BMTI sedang melaksanakan pengembangan beberapa program diantaranya pengembangan program, REP, PTD, Kemitraan, Diklat Alat Berat, Metodologi Pendidikan Teknik, dan Manajemen Sekolah. Pengembangan-pengembangan lain yang inovatif harus terus dikreasi.

Hal lain yang terkait dengan program, banyak program pelatihan yang sudah dilaksanakan masih kurang bermakna bagi kepentingan karier para guru. Hal ini perlu pengkajian dan pengembangan bagaimana agar sertifikat yang diperoleh dapat diperhitungkan sesuai dengan tuntutan sertifikasi profesi dan peningkatan karier lainnya.

2. Permasalahan Eksternal

a. Rata-rata nilai hasil UKG Nasional tahun 2015 adalah 56 sedangkan target UKG Nasional pada tahun 2019 adalah 80.
b. Keberadaan komunitas guru bidang keahlian produktif di setiap daerah belum merata.
c. Belum adanya komunitas guru adaptif terapan bidang keahlian Bidang Mesin dan Teknik Industri disetiap daerah.
d. Distribusi kualitas dan kuantitas Guru masih terkonsentrasi di kota-kota besar. Akibatnya pendidikan yang bermutu belum dapat dinikmati masyarakat di daerah yang jauh dari kota.
e. Peran Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam peningkatan kemampuan Guru belum optimal.

f. Pembinaan Guru di sekolah secara parsial ditangani oleh unit kerja yang berbeda di lingkungan Kemendikbud.
g. Peran PPPPTK Kejuruan dalam pembinaan Guru untuk bidang kejuruan semakin kecil dikarenakan mengikuti program prioritas Nasional.
h. Kelebihan guru adaptif sebagai dampak penyempurnaan kurikulum 2013

BAB II
PROFIL PPPPTK BIDANG MESIN DAN TEKNIK INDUSTRI

A. Sejarah

Cikal bakal PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri Bandung adalah STM Instruktor (ex SGPT) yang diselenggarakan oleh Proyek Peningkatan Mutu Pengajaran (PMPT) di Jalan Dr. Rum nomor 9 Bandung yang pada waktu itu dimaksudkan untuk mendukung program peningkatan mutu guru teknik pada proyek STM Pembangunan dan BLPT.

Melalui bantuan tenaga ahli Australia (1972-1975), dirumuskan satu bentuk kelembagaan yang disebut Technical Teacher Upgrading Centre, yang disingkat TTUC. Sejak tahun 1975/1976, kegiatan-kegiatan penataran telah mulai melembaga di TTUC.

Seiring dengan dampak positif dari peran TTUC terhadap pengembangan kemampuan guru, maka pada tahun 1978 diterbitkan Surat Keputusan Nomor 0205/0/1978 tentang kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Pengembangan Penataran Guru (PPPG) Teknologi Bandung, bersamaan dengan PPPG yang lain. Operasional PPPG Teknologi Bandung secara efektif dimulai pada tahun 1980.

Berkembangnya tuntutan peningkatan mutu pendidikan kejuruan, maka dikembangkan program penataran guru STM dalam bentuk Program Diploma III Guru Kejuruan (1982). Misi program ini adalah menciptakan guru STM menjadi guru profesional. Sebagai bagian dari upaya memantapkan organisasi dan manajemen, PPPG Teknologi Bandung, dituntut untuk menyajikan program dan manajemen yang berkualitas profesional.

Pada tahun 1986, kampus PPPG Teknologi Bandung dipindahkan dari Jl. Dr. Rum nomor 9 Bandung, ke Desa Ciwaruga Cimahi. Pada tanggal 14 Agustus tahun 1990 diterbitkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor: 0529/0/1990, yang menuntut diadakannya perampingan organisasi sekaligus diikuti dengan pengembangan kebijakan strategis, yakni pengakuan terhadap fungsi dan peranan PPPG Teknologi Bandung sebagi Pusat Pengembangan Pendidikan Teknik. Ini berarti semakin terbukanya peluang PPPG Teknologi Bandung melakukan program pengembangan sebagai subsistem yang sangat vital bagi pembangunan pendidikan menengah teknologi di Indonesia.

Perjalanan dan eksistensi PPPG Teknologi Bandung semakin membawa manfaat positif bagi pembangunan pendidikan teknologi kejuruan di Indonesia. Lembaga ini menjadi think-tank bagi Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Kekuatan kerjasama kelembagaan inter dan antar institusi luar dan dalam negeri serta kemitraan dan jaringan kerja dengan industri berskala nasional dan internasional, turut membentuk citra lembaga ini. Hal inilah yang membawa pengakuan terhadap eksistensi PPPG Teknologi Bandung sebagai "kawah candradimuka" dan the centre of excellence pendidikan teknologi kejuruan di Indonesia.

Budaya, etos kerja, kebersamaan, kreativitas dan inovasi telah terbentuk serta menjiwai pada setiap insan (pimpinan lembaga, pengajar, staf administrasi, teknisi, dan layanan teknis), sehingga membentuk suatu kesatuan yang selaras (sinergi) antara semangat dan tanggung jawab kerja yang tinggi.

Sejalan dengan berakhirnya program reguler Diploma III Guru Kejuruan pada tahun 1992, peran PPPG Teknologi beralih fungsi untuk melaksanakan pelatihan kompetensi yang rancangan dan pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dunia pendidikan dan industri. Hal ini menuntut perubahan layanan, strategi kerja yang lebih dinamis, dan fleksibel sehingga memberikan pengaruh PPPG Teknologi tumbuh menjadi lebih matang yang membawa keberhasilan untuk membangun jaringan kerja sama pada tataran nasional dan internasional.

Perubahan struktur organisasi tata kerja (SOTK) Depdiknas berdampak pada perubahan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pada PPPG seluruh Indonesia. Dengan diberlakukannya Permendiknas Nomor 8 tahun 2007 Pusat Pengembangan Penataran Guru Teknologi berubah nama dan fungsi menjadi Pusat Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Mesin dan Teknik Industri (PPPPTK BMTI). Melengkapi perubahan tersebut, diterbitkan Permendiknas Nomor 50 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Perubahan-perubahan tersebut meningkatkan peran PPPPTK BMTI tidak hanya memberikan layanan kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), tetapi juga memberikan layanan kepada setiap satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dalam mengembangkan

dan memberdayakan pendidik dan tenaga kependidikan dalam bidang kejuruan, teknologi dan sains.

B. Keudukan

PPPPTK BMTI adalah unit pelaksana teknis di bawah Dirjen PMPTK Departemen Pendidikan Nasional di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan, beralamat di Jalan Pasantren Km 2 Cibabat, Cimahi 40513. Lembaga ini didirikan pada tahun 1978. Organisasi dan tata kerjanya diatur berdasarkan Surat Keputusan Menteri dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, yaitu:

1. Permendiknas No. 8 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPPPTK.
2. Permendiknas Nomor 50 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Dalam operasionalisasinya, lembaga ini mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya kepada Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

PPPPTK BMTI dipimpin oleh Kepala Pusat (eselon 2B); dibantu oleh Kepala Bagian Umum (eselon 3) yang membawahi Kepala Subbagian Keuangan (eselon 4), Kepala Subbagian Tata Laksana dan Kepegawaian (eselon 4), Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga; Kepala Bidang Program dan Informasi (eselon 3), yang membawahi Kepala Seksi Program (eselon 4) dan Kepala Seksi Data dan Informasi (eselon 4). Kepala Bidang Fasilitasi Peningkatan Kompetensi (eselon 3) yang membawahi Kepala Seksi Penyelenggaraan, dan Kepala Seksi Evaluasi (eselon 4).

C. Visi dan Misi

Guna menetapkan Visi dan Misi yang akan dijalankan, maka perlu diketahui Visi dan Misi dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, yaitu:

Visi Ditjen GTK :
“Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong”

Misi Ditjen GTK:

1. Mewujudkan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Berkinerja Baik;
2. Mewujudkan Guru dan Tenaga Kependidikan yang Profesional dan Sejahtera;
3. Mewujudkan Penataan dan Distribusi Guru dan Tenaga Kependidikan yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan;
4. Mewujudkan Peningkatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan dan Pelibatan Publik.

Visi PPPPTK BMTI :

"Terbentuknya insan dan ekosistem pendidikan yang berkarakter untuk peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang profesional di Bidang Mesin dan Teknik Industri"

Misi PPPPTK BMTI:

1. Meningkatkan *kualitas/mutu* pendidik dan tenaga kependidikan kejuruan sesuai dengan standar;
2. Meningkatkan *ketersediaan* layanan fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah kejuruan
3. Memperluas *keterjangkauan* layanan fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan;
4. Mewujudkan *kesetaraan* dalam memperoleh layanan fasilitasi peningkatan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan;
5. Menjamin *kepastian* pendidik dan tenaga kependidikan memperoleh layanan fasilitasi peningkatan kompetensi; dan
6. Memperluas kerjasama antar lembaga dan dunia usaha/dunia industri serta masyarakat luas dalam pendidikan keprofesian berkelanjutan bagi pendidik dan tenaga kependidikan.

Makna dari setiap butir Misi diatas adalah sebagai berikut:

Misi 1: Meningkatkan *kualitas/mutu* pendidik dan tenaga kependidikan kejuruan sesuai dengan standar, bermakna bahwa peningkatan Komptensi Pendidik dan Tenaga kependidikan yang professional sesuai bidangnya adalah tugas pokok dari PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri. Hal ini diwujudkan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat) yang terstandar berdasarkan kebutuhan

kompetensi dan tuntutan perkembangan ilmu dan teknologi.

Misi 2 : Meningkatkan *ketersediaan* layanan fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah kejuruan, melalui peningkatan jumlah layanan fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga pendidikan sesuai kebutuhan sekolah menengah kejuruan, serta perkembangan ilmu dan teknologi. Untuk itu ketersedian layanan fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah kejuruan akan dilakukan peningkatan mutu dan relevansi layanan diklat secaca berkalanjutan.

Beberapa program yang telah dan akan dikembangkan dalam rangka mewujudkan mutu dan layanan diklat bidang Bidang Mesin dan Teknik Industri adalah:

1. Diklat Moduler. Layanan diklat dengan menggunakan moduler ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan keterbatasan layanan yang disebabkan anggaran pemerintah yang belum mencukupi untuk menyentuh seluruh pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) yang ada saat ini. Diklat moduler ini terutama diperuntukkan bagi PTK yang memiliki hasil uji kompetensi "diatas standar minimal", dimana calon peserta diklat akan diberikan modul-modul kompetensi sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan hasil uji kompetensi.
2. Program Pembentukan dan Pemberdayaan MGMP/MKKS/MKKPS. Tahun 2014 telah dibentuk MGMP sejumlah 12 kelompok kerja MGMP kelompok guru produktif pada 6 Kabupaten/Kota.
3. Pengembangan sistem diklat. Dengan tersedianya sistem diklat diharapkan PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri dapat memberikan layanan diklat dengan model kerjasama dengan pemerintah daerah, dimana setiap daerah dapat menyelenggarakan diklatnya sendiri dengan memperhatikan dan mengikuti sistem diklat yang disusun oleh PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri serta standar yang telah ditetapkan oleh PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri. PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri bertekad akan terus memantapkan program-program yang dilaksanakan

Misi 3 : Memperluas *keterjangkauan* layanan fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan. Sesuai dengan misi Kemdikbud, maka layanan diklat harus tersedia dan terjangkau secara merata diseluruh pelosok nusantara dan untuk seluruh lapisan masyarakat. Agar layanan diklat dapat merata pada seluruh wilayah nusantara, maka PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri sebagai unit pelaksana teknis (PTK) dari lembaga pusat, akan terus berusaha mencari altrnatif untuk memperluas akses layanan diklat yang dapat menjangkau seluruh wilayah binaan masing-masing PPPPTK. Beberapa program yang telah dan akan dikembangkan dalam rangka pemerataan dan perluasan akses adalah:

1. Diklat jarak Jauh. Tahun 2009, 2010 dan 2011 telah melakukan layanan diklat jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan sasaran mencapai 2440 peserta.
2. Pengembangan Pusat Belajar (PB) yang menjadi kepanjangan tangan dalam pelaksanaan diklat.
3. Peningkatan kompetensi pendidik dengan metode daring (dalam jaringan) Guru Pembelajar dalam lingkup wilayah di 12 provinsi.

Misi 4 : Mewujudkan *kesetaraan* dalam memperoleh layanan fasilitasi peningkatan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Hal ini bermakna setiap Kebijakan yang diambil dalam pemberian layanan fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan tidak membedakan faktor gender, sekolah negeri maupun swasta dan lokasi sekolah daerah 3 T (Terluar, Terdepan, dan Tertinggal)

Misi 5: Menjamin *kepastian* pendidik dan tenaga kependidikan memperoleh layanan fasilitasi peningkatan kompetensi. Hal ini bermakna perencanaan dan pelaksanaan program layanan fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kepandidikan dilakukan agar memberikan kepastian setiap pendidik dan tenaga kependidikan dalam lingkup wilayah binaan memperoleh layanan fasilitasi peningkatan kompetensi sesuai kebutuhan dan dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip layanan prima.

Untuk keperluan ini dilakukan beberapa hal, antara lain :

1. Rancangan program peningkatan kompetensi dikembangkan berdasarkan analisis kebutuhan pelaksanaan tugas pendidik dan tenaga kependidikan sekolah
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM institusi sesuai tuntutan pelaksanaan tugas
3. Meningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas institusi sesuai tuntutan program layanan fasilitasi peningkatan kompetensi.

Misi 6: Memperluas kerjasama antar lembaga dan dunia usaha/dunia industri serta masyarakat luas dalam pendidikan keprofesian berkelanjutan bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Hal ini bermakna dalam rangka memperluas *keterjangkauan* dan menjamin kepastian layanan fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai kebutuhan, maka kerjasama antar lembaga dan dunia usaha/dunia industri serta masyarakat luas dalam pendidikan keprofesian berkelanjutan bagi pendidik dan tenaga kependidikan menjadi fokus perhatian.

Kerjasama antar lembaga dan dunia usaha/dunia industri serta masyarakat luas diarahkan untuk

1. Tempat magang kerja tenaga pengajar / widyaiswara, dan pendidik dan tenaga kependidikan peserta layanan fasilitasi peningkatan kompetensi;
2. Pengembangan bahan ajar / modul sesuai kompetensi dunia kerja;
3. Pengembangan Skema Uji Kompetensi LSP-P2;
4. Pengembangan soal-soal tes hasil belajar / Materi Uji Kompetensi (MUK);
5. Pengajar tamu / nara sumber dalam berbagai kegiatan layanan fasilitasi peningkatan kompetensi;
6. Pemanfaatan fasilitas/peralatan institusi dan dunia kerja dalam berbagai kegiatan layanan fasilitasi peningkatan kompetensi; dan
7. Sebagai Pusat Belajar di wilayah binaan.

D. Sumber Daya Manusia dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Permendiknas No. 8 Tahun 2007 dan Permendiknas No. 50 tahun 2008, serta dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan efisiensi dan produktivitas, maka dalam

struktur organisasi PPPPTK BMTI dikembangkan sejumlah struktur dan jabatan internal.

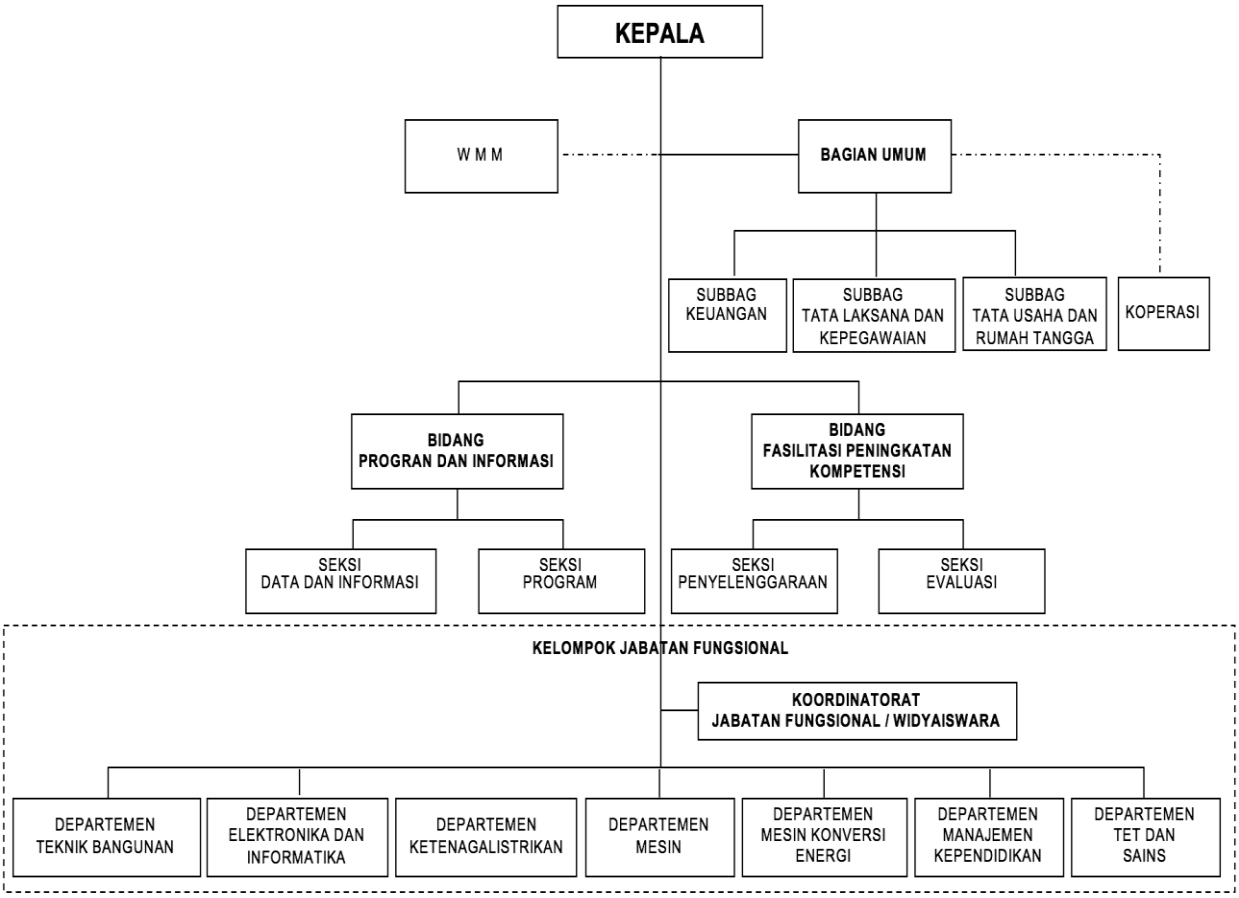

PPPPTK BMTI merupakan lembaga pendidikan dan pelatihan yang mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya kepada Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Dalam operasionalnya lembaga ini dipimpin oleh Kepala Pusat dan dibantu oleh Kepala Bagian Umum, Kepala Bidang Program dan Informasi, Kepala Bidang Fasilitasi Peningkatan Kompetensi, tiga Kepala Subbagian, empat Kepala Seksi dan Koordinator Widyaiswara. Guna melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka dibentuk unit kerja terkait yang disebut departemen. Adapun departemen-departemen tersebut adalah:

1. **Departemen Teknik Bangunan**

   Unit kerja ini dipimpin oleh seorang kepala departemen yang berasal dari tenaga fungsional (widyaiswara), dibantu oleh wakil kepala departemen urusan diklat dan wakil kepala departemen urusan non diklat.

Untuk mendukung implementasi program pelatihan pada Departemen Teknik Bangunan, maka operasionalisasi program pelatihan didukung oleh ketersediaan bengkel dan laboratorium: Bengkel Batu dan Beton, Bengkel Mesin Pekerjaan Kayu, Bengkel Kerja Bangku Kayu, Bengkel Plambing Sanitasi, Laboratorium Material Testing, Laboratorium Gambar Bangunan, Laboratorium Survei dan Pemetaan.

2. **Departemen Elektronika dan Informatika**

   Unit kerja ini dipimpin oleh seorang kepala departemen yang berasal dari tenaga fungsional (widyaiswara), dibantu oleh wakil kepala departemen urusan diklat dan wakil kepala departemen urusan non diklat.

   Untuk mendukung implementasi program pelatihan pada Departemen Elektronika dan Informatika, maka operasionalisasi program pelatihan didukung oleh ketersediaan laboratorium: Laboratorium Elektronika Dasar dan M&R, Laboratorium Mikro dan Sistem Pengendali, Laboratorium Audio Video, Laboratorium Multimedia dan *Broadcast*, Laboratorium Rekayasa Perangkat Lunak, dan Laboratorium Teknik Komputer Jaringan.

3. **Departemen Ketenagalistrikan**

   Unit kerja ini dipimpin oleh seorang kepala departemen yang berasal dari tenaga fungsional (widyaiswara), dibantu oleh wakil kepala departemen urusan diklat dan wakil kepala departemen urusan non diklat.

   Untuk mendukung implementasi program pelatihan pada Departemen Ketenagalistrikan, maka operasionalisasi program pelatihan didukung oleh ketersediaan bengkel dan laboratorium: Elektronika Dasar Kelistrikan, Bengkel Kerja Listrik, Laboratorium Otomasi, Laboratorium Robotik, Bengkel Instalasi Ketenagalistrikan, Laboratorium Sistem Tenaga Listrik dan Laboratorium Refrigerasi.

4. **Departemen Mesin Produksi dan Konstruksi**

   Unit kerja ini dipimpin oleh seorang kepala departemen yang berasal dari tenaga fungsional (widyaiswara), dibantu oleh wakil kepala departemen urusan diklat dan wakil kepala departemen urusan non diklat.

Untuk mendukung implementasi program pelatihan pada Departemen Mesin Produksi dan Konstruksi, maka operasionalisasi program pelatihan didukung oleh ketersediaan laboratorium: Bengkel Mesin Produksi, Bengkel Las, Bengkel Fabrikasi Logam, Laboratorium Mekatronika, Laboratorium Gambar, Laboratorium Pemeliharaan, dan Laboratorium Kontrol Kualitas.

5. **Departemen Mesin Konversi Energi**

   Unit kerja ini dipimpin oleh seorang kepala departemen yang berasal dari tenaga fungsional (widyaiswara), dibantu oleh wakil kepala departemen urusan diklat dan wakil kepala departemen urusan non diklat.

   Untuk mendukung implementasi program pelatihan pada Departemen Mesin Konversi Energi, maka operasionalisasi program pelatihan didukung oleh ketersediaan laboratorium: Bengkel Mekanik, Bengkel Alat Berat, Bengkel Body dan Pengecatan, dan Laboratorium Pesawat Tenaga.

6. **Departemen Manajemen Pendidikan**

   Unit kerja ini dipimpin oleh seorang kepala departemen yang berasal dari tenaga fungsional (widyaiswara), dibantu oleh wakil kepala departemen urusan diklat dan wakil kepala departemen urusan nondiklat. Untuk mendukung implementasi program pelatihan pada Departemen Pendidikan Umum dan Sains, maka operasionalisasi program pelatihan didukung oleh ketersediaan laboratorium: 1) Laboratorium Matematika dan IPA, 2) Laboratorium Bahasa, 3) Laboratorium Pendidikan Lingkungan Hidup, 4) Unit Manajemen Pendidikan dan Metodologi Pembelajaran.

7. **Depertemen Teknik Energi Terbarukan dan Sains**

   Departemen ini dibentuk sebagai tindak lanjut akan kebijakan pemerintah dalam memberdayakan energi terbarukan. Secara garis besar pada departemen ini ada Teknik Energi Terbarukan Keahlian Biomassa dan Teknik Energi Surya Hydro dan Angin.

E. Tujuan Strategis PPPPTK BMTI

Untuk merealisasikan visi, PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri telah menetapkan dua

tujuan strategis, agar dapat menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya visi dengan lebih jelas. Tujuan strategis ini pun berpedoman pada rumusan tujuan strategis Ditjen GTK 2015-2019. Tujuan strategis PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri tahun 2015-2019 yang diturunkan dari tujuan strategis Ditjen GTK 2015-2019, yaitu

Tujuan Strategis PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri
Tahun 2015 – 2019

DITJEN GTK			PPPPTK BMTI	
KODE	TUJUAN STRATEGIS		KODE	TUJUAN STRATEGIS
TD.2	Peningkatan Profesionalisme Guru dan Tenaga Kependidikan untuk Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu.		T.P1	Terlaksananya pengembangan dan pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bidang Teknologi dan rekayasa.
TD.4	Peningkatan Sistem Tata Kelola Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan yang Transparan dan Akntabel dengan Melibatkan Publik.		T.P2	Terlaksananya Sistem Tata Kelola yang Handal dalam Menjamin Terselenggaranya Layanan Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme PTK.

Sumber: Renstra Dirjen GTK

Tujuan Strategis PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri (TP.1) ditetapkan untuk mendukung Tujuan Strategis Ditjen GTK (TD.2). Tujuan Strategis PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri (TP.2) ditetapkan untuk mendukung Tujuan Strategis Ditjen GTK (TD.4).

Penjelasan dari masing-masing tujuan strategis tersebut adalah sebagai berikut:
Tujuan Strategis 1 *Terlaksananya pengembangan dan pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bidang Teknologi dan Rekayasa*, merupakan penjabaran untuk mendukung terwujudnya misi PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri.

Pendidikan yang bermutu sangat tergantung pada ketersediaan guru yang bermutu, karena guru adalah inti dari proses pendidikan dan menjadi kunci utama mutu pendidikan. Oleh karena itu diperlukan: (i) sistem peningkatan kompetensi yang menjamin meningkatnya *subject knowledge* dan *pedagogical knowledge* yang berdampak pada kualitas hasil belajar siswa; (ii) peningkatan profesionalisme guru melalui: pengembangan profesionalisme

berkelanjutan bagi guru dalam jabatan berbasis data dan hasil Uji Kompetensi Guru.

Tujuan Strategis 2 *Terlaksananya Sistem Tata Kelola yang Handal dalam Menjamin Terselenggaranya Layanan Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme PTK,* merupakan penjabaran untuk mengukur tercapainya peningkatan akuntabilitas kinerja PPPPTK BMTI bertujuan untuk menjaga agar tingkat perwujudan akuntabilitas pengelolaan kinerja dalam kategori B (baik), yaitu dengan cara peningkatan efisiensi dan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program kerja dan anggaran serta pengembangan koordinasi dan kerjasama. Selain itu konsistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi akan terus dilakukan dan difokuskan pada kebijakan untuk mewujudkan PPPPTK Pertanian sebagai pemberi layanan prima, mewujudkan tata kelola yang bersih, efektif dan efisien, Wilayah Bersih Bebas Korupsi (WBBK) dan transparansi dengan melibatkan publik dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan berbasis data, riset, dan bukti lapangan.

F. Sasaran Strategis PPPPTK BMTI

Selanjutnya, untuk mengetahui ketercapaian tujuan stategis, maka perlu dijabarkan ke dalam sasaran strategis sehingga tujuan strategis lebih terukur. Sasaran Strategis ini menggambarkan kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra. PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri telah menetapkan sejumlah sasaran strategis yang akan dicapai sepanjang periode Renstra 2015 - 2019 dan akan menopang ketercapaian sasaran strategis Ditjen GTK. Untuk itu, penyusunan sasaran strategis PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri harus berpedoman pada sasaran strategis Ditjen GTK yang sesuai dengan tugas dan fungsi PPPPTK. Adapun tujuan strategis Ditjen GTK dan kaitannya dengan PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis untuk mencapai Tujuan Strategis PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri T.P1

Sasaran Strategis untuk mencapai Tujuan Strategis
PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri T. P1

Dirjen GTK		PPPPTK BMTI	
Kode	Sasaran Strategi	Kode	Sasaran Strategi
SSD 2	Meningkatnya profesional guru dan tenaga kependidikan	SS1-P1	Meningkatnya kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai bidang

			mesin dan teknik industri

2. Sasaran Strategis untuk mencapai Tujuan Strategis PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri T.P2 (Terlaksananya Sistem Tata Kelola yang Handal dalam Menjamin Terselenggaranya Layanan Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme PTK)

Sasaran Strategis untuk mencapai Tujuan Strategis PPPPTK
Bidang Mesin dan Teknik Industri T. P2

Dirjen GTK		PPPPTK BMTI	
Kode	Sasaran Strategi	Kode	Sasaran Strategi
SSD 4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	SS2-P2	Terlaksananya sistem tata kelola yang handal dalam Menjamin Terselenggaranya Layanan Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme PTK.

G. Tata Nilai PPPPTK BMTI

Untuk memandu pencapaian visi dan misi serta untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, maka diperlukan tata nilai yang dipergunakan sebagai pedoman bagi seluruh insan Ditjen GTK. Tata nilai ini merupakan dasar sekaligus arah untuk mendukung dan memandu seluruh pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang sedang dikerjakan. Tata nilai Ditjen GTK mengacu pada tata nilai yang diutamakan pada Renstra Kemendikbud 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Memiliki Integritas Konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan, terutama dalam hal kejujuran dan kebenaran dalam tindakan, memiliki integritas, bersikap jujur, dan mampu mengemban kepercayaan.
2. Kreatif dan Inovatif Memiliki pola pikir, cara pandang, dan pendekatan yang variatif terhadap setiap permasalahan, serta mampu menghasilkan karya baru.
3. Inisiatif Inisiatif adalah kemampuan bertindak melebihi yang dibutuhkan atau yang dituntut dari pekerjaan, melakukan sesuatu tanpa menunggu perintah lebih dahulu dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan hasil pekerjaan, dan menciptakan peluang baru atau untuk menghindari timbulnya masalah.
4. Pembelajar Berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah dan memperluas

wawasan, pengetahuan dan pengalaman serta mampu mengambil hikmah dan mejadikan pelajaran atas setiap kejadian.

5. Menjunjung Meritokrasi Memiliki pandangan yang memberi peluang kepada orang untuk maju berdasarkan kelayakan dan kecakapannya.
6. Terlibat Aktif Suka berusaha mencapai tujuan bersama serta memberikan dorongan agar pihak lain tergerak untuk menghasilkan karya terbaiknya.
7. Tanpa Pamrih Tidak memiliki maksud yang tersembunyi untuk memenuhi keinginan dan memperoleh keuntungan pribadi, memberikan dorongan dan semangat bagi pihak lain untuk suka berusaha mencapai tujuan bersama, memberikan inspirasi, dan memberikan dorongan agar pihak lain tergerak untuk menghasilkan karya terbaiknya.

Aspek manusia merupakan tata nilai yang dianut dan disepakati oleh seluruh anggota organisasi yang harus dijadikan motto bagi seluruh anggota organisasi dalam bekerja dan berhubungan satu sama lainnya. Tata nilai yang telah dianut dan akan terus dipertahankan moto " ***Better Management Trough Intrinsic Motivation*** ". Dalam rangka mencapai visi, maka PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri telah sepakat menggunakan nilai-nilai lembaga sebagai berikut:

Thrustworty : Saling percaya, dipercaya dan terpercaya
Educated : Pembelajar sepanjang hayat
Dedicated : Displin, professional dan bertanggung jawab
Care : Peduli dan tanggap terhadap lingkungan

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri

Arah kebijakan dan strategi Kemendikbud sebagaimana tertuang dalam Renstra Kemendikbud 2015-2019 mengacu pada RPJMN 2015-2019, mendasarkan pada sembilan agenda prioritas (NAWA CITA) untuk menuju Indonesia yang berdaulat, secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Kesembilan agenda prioritas (NAWA CITA) tersebut, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
2. **Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya**;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. **Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;**
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa- bangsa Asia lainnya;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. **Melakukan revolusi karakter bangsa; dan**
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Diantara sembilan agenda prioritas (NAWA CITA), terdapat dua hal yang terkait dengan tugas dan fungsi Kemendikbud, yaitu: 1) pembangunan pendidikan tertuang dalam NAWA CITA 5 dan NAWA CITA 8; dan 2) pembangunan tata kelola dan reformasi birokrasi tertuang dalam NAWA CITA 2.

Dalam rangka mendukung Arah Kebijakan Ditjen GTK dan Kemendikbud serta agenda prioritas (NAWA CITA) tersebut, maka PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri merumuskan arah kebijakan dan strategi untuk mencapai Sasaran Strategis pada setiap

Tujuan yang dapat diuraikan sebagai berikut ini

1. Arah Kebijakan dan strategi PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri untuk mencapai (SS1.P1) pada (TP.1) yaitu meningkatnya kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Bidang Mesin dan Teknik Industri dalam mendukung (SSD.2) dari (T2) Renstra Ditjen GTK yaitu sebagai berikut:
   a. Pengembangan karir guru dan tenaga kependidikan melalui Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) atau *Continuing Professional Development* (CPD)
   b. Peningkatan peran serta guru dalam penataan kurikulum melalui: (i) penguatan kerja sama antara guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah untuk mendukung efektivitas pembelajaran; (ii) penguatan praktek pembelajaran di kelas untuk guru dan kepala sekolah agar mampu melaksanakan kurikulum secara baik; dan (iii) penyediaan dukungan materi pelatihan secara daring (*online*) untuk membangun jaringan pertukaran materi pembelajaran dan penilaian antar guru.

2. Arah kebijakan dan strategi PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri untuk mencapai (SS2.P2) pada (TD.2) yaitu terlaksananya sistem tata kelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan Bidang Mesin dan Teknik Industri dalam mendukung (SSD.4) dari (T4) Renstra Ditjen GTK yaitu sebagai berikut:
   a. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri melalui penguatan kelembagaan dan tatakelola reformasi birokrasi dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri;
   b. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan cara: (i) penguatan kerangka kebijakan kelembagaan pelayanan dalam rangka kemitraan antara pemerintah dan swasta; (ii) peningkatan pelayanan publik yang lebih terintegrasi dengan Unit Layanan Terpadu (ULT), memastikan implementasi kebijakan secara konsisten sebagaimana diamanatkan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; penetapan *quick wins* pelayanan publik Ditjen GTK; (iii) penguatan kapasitas pengendalian kinerja pelayanan publik, yang meliputi pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pengawasan, termasuk pengawasan oleh masyarakat; dan (iv) peningkatan layanan fasilitasi peningkatan kompetensi;
   c. Peningkatan partisipasi masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya, melalui: (i) penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah,

organisasi masyarakat sipil, swasta, dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan pembinaan guru dan tenaga kependidikan; dan (ii) diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembinaan guru dan tenaga kependidikan melalui berbagai media;

d. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri secara terintegrasi, dapat dipercaya dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
e. Penerapan *e-government* dan *e-procurement* untuk mendukung bisnis proses PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri yang efisien, efektif, transparan, terpercaya, professional, peduli dan terintegrasi melalui: (i) peningkatan kapasitas kelembagaan dan kompetensi manusia yang berkualitas; dan (ii) penetapan *quick wins* penerapan *e-government*;
f. Penguatan manajemen kinerja PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri yang dilaksanakan melalui: (i) penguatan kualitas perencanaan dan penganggaran untuk meningkatkan kualitas belanja negara; (ii) penguatan implementasi manajemen kinerja; (iii) penguatan pengendalian kinerja meliputi pemantauan dan evaluasi yang efektif dan terintegrasi.

Arah kebijakan PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri selanjutnya dilaksanakan melalui program dan dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan periode 2015—2019. Didalam Struktur kegiatan lingkup Ditjen GTK, bertanggung jawab atas Program Guru dan Tenaga Kependidikan. Struktur kegiatan dan Unit Eselon II yang bertanggung jawab untuk mengelola kegiatan dibawah ini:

Program, Kegiatan dan Penanggungjawab Lingkup Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan

Tabel 3.1 Program, Kegiatan dan Penanggungjawab

Kode	Program/Kegiatan	Eselon I / Eselon II / UPT
13	**Program Guru dan Tenaga Kependidikan**	**Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan**
5634	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	PPPPTK/LPPKS/LPPPTK KPTK

Sumber: Renstra Ditjen GTK 2015 - 2019

Program Guru dan Tenaga Kependidikan bertujuan untuk mencapai:

1. peningkatan kualitas pengelolaan guru dan pendidik lainnya serta tenaga kependidikan PAUD dan dikmas;
2. peningkatan kualitas pengelolaan guru dan tenaga kependidikan dikdas;
3. peningkatan kualitas pengelolaan guru dan tenaga kependidikan dikmen;
4. peningkatan kualifikasi, kompetensi dan profesionalitas guru dan pendidik lainnya serta tenaga kependidikan PAUD dan dikmas, dikdas, serta dikmen;
5. peningkatan pengembangan karier, penghargaan, dan pelindungan serta kesejahteraan guru, pendidik lainnya dan tenaga kependidikan PAUD dan dikmas, dikdas, serta dikmen;
6. peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan guru dan pendidik lainnya serta tenaga kependidikan**;**
7. peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan serta partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat; dan
8. peningkatan sistem tata kelola kementerian yang transparan dan akuntabel.

Selanjutnya pelaksanaan kebijakan program PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri diuraikan dalam Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Sebagai salah satu UPT pada lingkup Ditjen GTK, maka SK dan IKK PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri dapat dilihat pada tabel 3.2. berikut:

Tabel 3.2.

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja PPPPTK BMTI

KODE	SASARAN STRATEGIS	KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
SS1.P1	Meningkatnya kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai bidangnya	**IKK1.P1 (IKK1.9)**	Jumlah guru yang berkompeten bidang Mesin dan Teknik Industri
		IKK1.P2 (IKK1.14)	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan lainnya yang kompeten
		IKK1.P2 (IKK1.15)	Jumlah kepala sekolah dan calon kepala sekolah yang kompeten
		IKK1.P2 (IKK1.16)	Jumlah pengawas sekolah dan calon pengawas sekolah yang kompeten

KODE	SASARAN STRATEGIS	KODE	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
		IKK1.P2 (IKK1.17)	Jumlah guru yang berkompeten bidang Tematik
SS2.P2	Terlaksananya Sistem Tata Kelola yang Handal dalam menjamin Terselenggaranya Layanan Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme PTK	**IKK2.P1**	Meningkatnya tata kelola dan sistem pengendalian di PPPPTK Mesin dan Teknik Industri
		IKK2.P2	Meningkatnya SDM PPPPTK BMTI yang hadir melaksanakan Tugas
		IKK2.P3	Meningkatnya Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Peraturan Perundang- undangan dan Tepat Waktu
		IKK2.P4	Tercapainya Daya Serap Fisik sesuai target
			Tercapainya Daya Serap Anggaran
		IKK2.P5	Meningkatnya kesesuaian Laporan BMN dengan Peraturan Perundang-undangan dan Tepat Waktu
		IKK2.P6	Terlaksananya penerapan e-Pengadaan

B. Kerangka Regulasi

Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik maka perlu didukung dengan regulasi yang memadai sebagai sebagai legalitas operasionalisasi dari arah kebijakan PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri. Kerangka regulasi diarahkan untuk penyediaan peraturan perundangan yang terkait dengan pembinaan guru dan tenaga kependidikan. Kerangka regulasi yang akan disusun antara lain adalah identifikasi Peraturan Menteri, Peraturan Dirjen maupun Keputusan Dirjen yang terkait dengan pembinaan guru dan tenaga kependidikan, termasuk dalam rangka menciptakan sinkronisasi pelaksanaan pembinaan guru dan tenaga kependidikan antara pusat dan daerah

Berikut dijabarkan kerangka regulasi yang terkait dengan Program Guru dan Tenaga Kependidikan, Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Guru dan Tenaga Kependidikan, yang dibutuhkan untuk mengawal tercapainya arah kebijakan, strategi dan Sasaran Strategis PPPPTK BMTI 2015—2019 serta urgensi perlunya kerangka regulasi.

Perincian mengenai jenis dan pentingnya regulasi dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Ditjen GTK, menjadi bagian penting yang harus dipertimbangkan oleh PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri serta menjadi pihak yang berkontribusi didalamnya. Mengacu pada Renstra Ditjen GTK, Kerangka Regulasi ini dijelaskan pada Tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3 Kerangka Regulasi

No	Arah Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian
1	Permendikbud tentang Pengelolaan Guru apabila PP nya telah disahkan	Agar ada pembagian kewenangan dan tanggungjawab yang jelas dalam pengelolaan guru, baik yang bersifat urusan wajib, urusan pilihan maupun urusan bersama yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
2	Peraturan perundangan terkait dengan upaya peningkatan efesiensi pemanfaatan anggaran pendidikan terutama berkaitan dengan penyediaan guru	Memperjelas kewenangan dan tanggungjawab mengenai penyediaan guru dan penganggarannya yang dibebankan secara proposional kepada pemerintah dan pemerintah daerah serta komitmen dalam peningkatan profesionalisme dan kinerja guru.
3	Meninjau kembali dan bila perlu revisi Undang-Undang No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen	Pemenuhan beban mengajar guru 24 jam–40 jam tatap muka perlu dievaluasi ulang mengingat: a. kebutuhan jam mengajar guru dalam struktur kurikulum setiap mapel berbeda; b. tuntutan pemenuhan jam mengajar guru berakibat guru harus mengajar di beberapa tempat bagi guru yang secara struktur kurikulum jamnya sedikit.
4	Meninjau kembali dan Revisi Peraturan Pemerintah No 74 tahun 2005 tentang Guru	Pelaksanaan sertifikasi guru, pemberian tunjangan guru, dan pengaturan terhadap pemenuhan beban kerja guru perlu disempurnakan.
5	Permendikbud terkait pelaksanaan sertifikasi guru yang diangkat setelah tahun 2006	Sampai dengan saat ini masih terdapat lebih dari 300 ribu guru yang diangkat pada tahun 2006 ke atas yang perlu diatur proses pelaksanaan sertifikasinya

Sumber: Renstra Ditjen GTK 2015 – 2019

C. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan adalah perangkat PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri yang meliputi struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara. Kerangka kelembagaan disusun dengan tujuan untuk: (i) meningkatkan koordinasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan fungsi dan visi/misi PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri; (ii) memperjelas ketatalaksanaan dan meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur. Berdasarkan Permendikbud nomor 16 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Bidang Mesin dan Teknik Industri mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan pada Bidang Mesin dan Teknik Industri. Dalam melaksanakan tugas di atas. PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan;
2. Pengelolaan data dan informasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
3. Fasilitasi dan pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
4. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan;
5. Evaluasi program dan fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; dan
6. Pelaksanaan urusan administrasi PPPPTK.

Berdasarkan pada tugas dan fungsi tersebut, dalam rangka melakukan aktifitas operasionalnya, organisasi PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri terdiri atas:

1. Kepala;
2. Bagian Umum;
3. Bidang Program dan Informasi;
4. Bidang Fasilitasi Peningkatan Kompetensi; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Penetapan target kinerja ditentukan setelah Indikator Kinerja disusun. Target kinerja menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri dalam periode 2015—2019. Oleh karena itu didalam menyusun dan menetapkan target kinerja mengacu dan memperhatikan beberapa kriteria, yaitu:

1. Target kinerja harus dapat menggambarkan angka kuantitatif dan menyebutkan satuan yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja;
2. Penetapan target dipilih karena relevan dengan indikator kinerjanya, logis dan berdasarkan pada baseline data yang jelas.

Target kinerja program Eselon II harus mencerminkan target kinerja instansi vertikal, kementerian dan program prioritas nasional. Selanjutnya melalui reformasi perencanaan dan penganggaran diharapkan diperoleh gambaran kerangka anggaran selama lima tahun mendatang. Setelah tersusunnya Renstra ini, PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri akan menjabarkannya kedalam rencana tahunan yang terukur dengan menerapkan prinsip penganggaran berbasis kinerja.

Uraian penjelasan dari setiap target kinerja PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri adalah sebagai berikut:

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis (SSP) dapat diukur dari ketercapaian target.
IKK.P. Tabel 4.1 dan 4.2 menjabarkan target kinerja PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri.

1. TP.1: *Terlaksananya Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Mesin dan Teknik Industri*, dapat ditandai dengan tercapainya Sasaran Strategis Lembaga, sebagai berikut:

Tabel 4.1
Target Kinerja Sasaran Strategis 1 PPPPTK BMTI Periode Renstra 2015 – 2019

Kode	Sasaran Strategis	Satuan	Kondisi Awal	2015	2016	2017	2018	2019
SS1.P1.	Meningkatnya kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai bidangnya							
IKK1.P1 (IKK1.10)	Jumlah guru yang	orang	7.256	2.621	11.795	3.623	2.635	3.500

Kode	Sasaran Strategis	Satuan	Kondisi Awal	2015	2016	2017	2018	2019
	berkompeten bidang mesin dan teknik industri							
IKK1.P2 (IKK1.14)	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan lainnya yang kompeten	orang	-	200	48	59	200	200
IKK1.P3 (IKK1.15)	Jumlah kepala sekolah dan calon kepala sekolah yang kompeten	Orang	-	3.398	202	80	105	120
IKK1.P4 (IKK1.16)	Jumlah pengawas sekolah dan calon pengawas sekolah yang kompeten	orang	-	145	38	40	70	80
IKK1.P5 (IKK1.17)	Jumlah guru yang berkompeten bidang Tematik	orang	-	2.100	51.846	3.099	27.002	-

Tabel 4.2

Progres pencapaian target sasaran strategis 1 PPPPTK BMTI Periode Renstra 2015 – 2019

Kode	Sasaran Strategis	Target Satuan	Progres Pencapaian Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
SS1.P1.	Meningkatnya kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai bidangnya						
IKK1.P1 (IKK1.10)	Jumlah guru yang berkompeten bidang teknologi rekayasa	24.174 orang	2.621	14.416	18.039	32.151	24.174
IKK1.P2 (IKK1.14)	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan lainnya yang kompeten	659 orang	200	200	259	459	659
IKK1.P3 (IKK1.15)	Jumlah kepala sekolah dan calon kepala sekolah yang kompeten	3.905 orang	3.398	3.600	3.680	3.785	3.905
IKK1.P4	Jumlah pengawas	373	145	183	223	293	373

Kode	Sasaran Strategis	Target Satuan	Progres Pencapaian Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
(IKK1.16)	sekolah dan calon pengawas sekolah yang kompeten	orang					
IKK1.P5 (IKK1.17)	Jumlah guru yang berkompeten bidang Tematik	84.047 orang	2.100	53.946	57.045	84.047	84.047

2. TP.2: *Terlaksananya Sistem Tata Kelola yang Handal dalam Menjamin Terselenggaranya Layanan Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme PTK,* dapat ditandai dengan tercapainya Sasaran Strategis Lembaga, sebagai berikut:

Target Kinerja Sasaran Strategis 2 Periode Renstra 2015 – 2019

Tabel 4.3
Target Kinerja Sasaran Strategis 2 PPPPTK BMTI Periode Renstra 2015 – 2019

Kode	Sasaran Strategis	Target Satuan	Kondisi Awal	2015	2016	2017	2018	2019
SS2.P2.	Terl aksananya Sistem Tata Kelola yang Handal dalam Menjamin Terselenggaranya Layanan Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme PTK							
IKK2.P1	SDM Internal P4TK BMTI yang ditingkatkan kompetensi dan/atau kualifikasi per tahun	Orang	200	611	347	208	200	200
IKK2.P2	SDM PPPPTK BMTI yang hadir melaksanakan Tugas	>98%	99%	99%	99%	99%	99%	99%
IKK2.P3	Tingkat Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Tepat Waktu	> 90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
IKK2.P4	Daya Serap Fisik	> 95%	95%	96.88%	98.63%	99.99%	99.99%	99.99%
	Daya Serap Anggaran	> 95%	95%	71.83%	103.50%	103.33%	105%	105%

Kode	Sasaran Strategis	Target Satuan	Kondisi Awal	2015	2016	2017	2018	2019
IKK2.P5	Tingkat Kesesuaian Laporan BMN dengan Peraturan Perundang-undangan dan Tepat Waktu	> 90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
IKK2.P6	Penerapan e-Pengadaan	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%

B. Kerangka Pendanaan

Pengelolaan dana pendidikan harus berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik, untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Dengan mendasarkan pada perkiraan penganggaran Ditjen GTK, maka PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri memperkirakan kerangka anggaran secara menyeluruh sebagai berikut:

1. Perkiraan Pendanaan

   Perkiraan pendanaan dalam kurun waktu 2015—2019 sesuai dengan hasil perhitungan dalam Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) untuk melaksanakan program dan kegiatan Ditjen GTK yang diampu oleh PPPPTK, didapatkan perkiraan kebutuhuan anggaran seperti ditunjukkan pada Tabel 4.4

Perkiraan Kebutuhan Anggaran
PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri 2015—2019 (dalam Rp.juta)

Kode	Program / Kegiatan	2015	2016	2017	2018	2019	Total
023.11	**Program Guru dan Tenaga Kependidikan**						
5634	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	37.382	93.045	88.799	112.730	90.000	331.956
5635	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	48.451	47.947	47.273	61.256	60.000	204.927
	JUMLAH	85.833	140.992	136.072	173.986	150.000	536.883

2. Koordinasi, Tata Kelola dan Pengawasan Internal

   Untuk mencapai tujuan pembangunan yang dituangkan dalam Renstra perlu dilakukan

koordinasi secara internal lembaga dan antar instansi terkait, penataan sistem tata kelola, dan pengawasan internal lingkup lembaga.

a. Koordinasi Perencanaan Program

   Koordinasi penyusunan dan pelaksanaan Renstra PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri dilakukan melalui forum rapat kerja perencanaan internal dan eksternal lembaga. Pihak yang dilibatkan dalam forum koordinasi perencanaan antara lain Unit Utama Kemendikbud, Ditjen GTK, PPPPTK, Pemerintah Daerah, SMK Bidang Mesin dan Teknik Industri, dan mitra lainnya.

b. Tata Kelola

   Perlu dilakukan penataan terhadap tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ditetapkan untuk mewujudkan sasaran indikator kinerja program. Pengembangan sistem tata kelola implementasi Renstra mencakup kegiatan penyusunan standar operasional dan prosedur (SOP) dalam penyusunan dokumen perencanaan berbasis kinerja, sosialisasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam Renstra.

c. Pengendalian dan Pengawasan

   Pengendalian terhadap implementasi Renstra dilakukan melalui pengawasan internal yang merupakan tanggungjawab dari tim pengawasan yaitu Satuan Pengawasan Internal (SPI) dan Inspektorat Jenderal (Itjen) Sistem pengawasan internal yang efektif dilakukan melalui pengendalian operasional dan finansial, manajemen risiko, sistem informasi manajemen, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengawasan internal bertujuan untuk memastikan sistem tata kelola implementasi Renstra sesuai dengan sistem tata kelola kementerian.

C. Sistem Pemantauan dan Evaluasi

Sistem pemantauan dan evaluasi merupakan penjaminan mutu yang tidak terpisahkan dari implementsi Renstra. Sistem penjaminan mutu bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra dengan hasil yang dicapai berdasarkan kebijakan yang dilaksanakan melalui kegiatan dan/atau program secara berkala dan berkelanjutan.

Kegiatan penjaminan mutu dilakukan dengan melalui kegiatan yang diawali dengan perencanaan (*Plan*), pelaksanaan (*Do*), pemantauan (*Check*) dan melakukan tindakan perbaikan (*Action*).

Hubungan antara komponen-komponen utama dapat dilihat dalam diagram di bawah ini.

Diagram 4.1. Penjaminan dan Peningkatan Mutu

BAB V
PENUTUP

Renstra PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri Tahun 2015—2019 revisi tahun 2017 telah disusun melalui berbagai proses dan tahapan. Renstra disusun berlandaskan pada berbagai perkembangan kebijakan, capaian kinerja hingga saat ini, serta hasil analisis kondisi internal dan eksternal untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan strategis dan sasaran strategis PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri, yang akan mendukung perwujudan visi Kemendikbud yaitu "Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong". Renstra ini juga telah mengakomodasi tugas dan fungsi PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri sebagaimana Permendikbud Nomor 16 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK). Renstra PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri ini merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

lingkup tugas dan fungsi untuk periode 5 (lima) tahun (2015 hingga 2019) memuat visi, misi, tujuan strategis, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, program, dan kegiatan pendidikan dan pelatihan guru dan tenaga kependidikan. Dengan demikian, Renstra ini berperan penting untuk menuntun lembaga dalam menyusun (1) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA); (2) Rencana Kinerja Tahunan (RKT); (3) Penetapan Kinerja (PK); dan (5) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Akhirnya, semoga Renstra PPPPTK Bidang Mesin dan Teknik Industri periode 2015 – 2019 revisi tahun 2017 dapat dipahami dan dimanfaatkan oleh semua pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengendalian program dan kegiatan pendidikan dan pelatihan guru dan tenaga kependidikan secara efisien, efektif, terintegrasi, sinergis dan berkesinambungan. Pelibatan publik atau keterlibatan aktif banyak pihak dalam kegiatan pembangunan bidang diklat guru dan tenaga kependidikan Bidang Mesin dan Teknik Industri ini diharapkan mampu meningkatkan mutu pendidikan dan pemberdayaan Guru dan Tenaga Kependidikan khususnya dan pembangunan bidang pendidikan secara umum selama lima tahun mendatang.

1. KETERKAITAN MISI, TUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN STRATEGIS (diambil dari Power Point pa Made, ambil yang 6 Misi)

MISI		TUJUAN STRATEGIS		SASARAN STRATEGIS	
MP.1	Meningkatkan *kualitas/mutu* pendidik dan tenaga kependidikan Kejuruan sesuai dengan standar	T.P1	Terlaksananya pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan bidang mesin dan teknik industri	SS1.P1	Meningkatnya kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai bidangnya (mesin dan teknik industri)
MP.2	Meningkatkan *ketersediaan* layanan fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah kejuruan	T.P2	Terlaksananya sistem tata kelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan peningkatan kompetensi dan profesionalisme PTK	SS2.P2	Terlaksananya sistem tata kelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan peningkatan kompetensi dan profesionalisme PTK
MP.3	Memperluas *keterjangkauan* layanan fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan				
MP.4	Mewujudkan *kesetaraan* dalam memperoleh layanan fasilitasi peningkatan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan				

MP.5	Menjamin *kepastian* pendidik dan tenaga kependidikan memperoleh layanan fasilitasi peningkatan kompetensi	
MP.6	Memperluas kerjasama antar lembaga dan dunia usaha/dunia industri serta masyarakat luas dalam pendidikan keprofesian berkelanjutan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	

2. ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN STRATEGIS

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
T.P1. Terlaksananya pengembangan dan pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bidang mesin dan teknik industri	SS1.P1 Meningkatnya kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai bidangnya (mesin dan teknik industri)	Peningkatan pengembangan karir guru dan tenaga kependidikan	Pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) atau Continuing Professional Development (CPD)
		Peningkatan peran serta guru dalam penataan kurikulum	• Kerja sama antara guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah untuk mendukung efektivitas pembelajaran; • Penguatan praktek pembelajaran di kelas untuk guru dan kepala sekolah agar mampu melaksanakan kurikulum secara baik; • Penyediaan dukungan materi pelatihan secara daring (*online*) untuk membangun jaringan pertukaran materi pembelajaran dan

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
			penilaian antar guru.
T.P2 Terlaksananya Sistem Tata Kelola yang Handal dalam Menjamin Terselenggaranya Layanan Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme PTK	SS2.P2 Terlaksananya Sistem Tata Kelola yang Handal dalam Menjamin Terselenggaranya Layanan Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme PTK	Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi PPPPTK BMTI	• Penguatan kerangka kebijakan kelembagaan pelayanan dalam rangka kemitraan antara pemerintah dan swasta; • Peningkatan pelayanan publik yang lebih terintegrasi dengan Unit Layanan Terpadu (ULT) memastikan implementasi kebijakan secara konsisten sebagaimana diamanatkan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; • Penetapan *quick wins* pelayanan publik; • Penguatan kapasitas pengendalian kinerja pelayanan publik, yang meliputi pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pengawasan.
		Peningkatan kualitas pelayanan publik	• Penguatan kerangka kebijakan kelembagaan pelayanan dalam rangka kemitraan antara pemerintah dan swasta; • Peningkatan pelayanan publik yang lebih terintegrasi dengan Unit Layanan Terpadu (ULT) • Memastikan implementasi kebijakan secara konsisten sebagaimana diamanatkan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; • Penetapan *quick wins* pelayanan publik; • Penguatan kapasitas pengendalian kinerja pelayanan publik, yang meliputi pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pengawasan.
		Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya,	• Penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta, dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan pembinaan guru dan tenaga kependidikan; • Diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembinaan guru dan tenaga kependidikan melalui berbagai media;
		Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja PPPPTK BMTI secara terintegrasi, kredibel dan dapat diakses publik	Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
		Menerapkan e-government untuk mendukung bisnis proses PPPPTK BMTI yang efisien, efektif,	• Kapasitas kelembagaan dan kompetensi manusia yang berkualitas; • Penetapan *quick wins* penerapan *e-government*

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
		transparan, dan terintegrasi	
		Menguatkan manajemen kinerja PPPPTK BMTI	• Penguatan kualitas perencanaan dan penganggaran untuk meningkatkan kualitas belanja negara; • Penguatan implementasi manajemen kinerja; • Penguatan pengendalian kinerja meliputi pemantauan dan evaluasi yang efektif dan terintegrasi.

3. SASARAN KEGIATAN DAN TARGET KINERJA KEGIATAN TAHUN 2015 – 2019

Kode	Sasaran Strategis	Target Satuan	Kondisi Awal	2015	2016	2017	2018	2019
Kegiatan 5643: Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sasaran Kegiatan: SS1.P1. Meningkatnya kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai bidangnya								
IKK1.P1	Jumlah guru yang berkompeten bidang teknologi rekayasa	orang	7.256	2.621	11.795	3.623	14.112	669
IKK1.P2	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan lainnya yang kompeten	orang	80	200	48	59	200	200
IKK1.P2	Jumlah kepala sekolah dan calon kepala sekolah yang kompeten	orang	80	3.398	202	80	105	120
IKK1.P2	Jumlah pengawas sekolah dan calon pengawas sekolah yang kompeten	orang	80	145	38	40	70	80
IKK1.P2	Jumlah guru berkompeten bidang Tematik	orang	16.000	2.100	51.846	3.099	15.525	-
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sasaran Kegiatan: SS2.P2. Terlaksananya Sistem Tata Kelola yang Handal dalam Menjamin Terselenggaranya Layanan Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme PTK								
IKK2.P1	SDM Internal P4TK BMTI yang ditingkatkan kompetensi dan/atau kualifikasi per tahun	orang	200	611	347	208	200	200
IKK2.P2	SDM PPPPTK BMTI yang hadir melaksanakan Tugas	>98%	99%	99%	99%	99%	99%	99%
IKK2.P3	Tingkat Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Tepat Waktu	> 90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
IKK2.P4	Daya Serap Fisik	> 95%	95%	96.88%	98.63%	99.99%	99.99%	99.99%
	Daya Serap Anggaran	> 95%	95%	71.83%	103.50%	103.33%	105%	105%
IKK2.P5	Tingkat Kesesuaian Laporan BMN dengan Peraturan Perundang- undangan dan Tepat Waktu	> 90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
IKK2.P6	Penerapan e- Pengadaan	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%